

EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN DUMAI KOTA KECAMATAN DUMAI KOTA - KOTA DUMAI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains



OLEH :

NAMA : LILI SURYANI
NOMOR MAHASISWA : 177122069
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
BKU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN
DUMAI KOTA KECAMATAN DUMAI KOTA – KOTA DUMAI**

TESIS

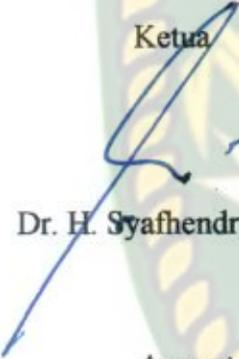
Oleh

LILI SURYANI

NPM : 177122069

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. H. Syafhendry, M.Si

Sekretaris


Drs. Parjiyana, M.Si

Anggota I


Dr. Ahmad Fitra Yuzza, S.Ip., M.A

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN
DUMAI KOTA KECAMATAN DUMAI KOTA – KOTA DUMAI**

TESIS

Nama : LILI SURYANI
NPM : 177122069
Program Studi : Administrasi Publik

Telah di periksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pekanbaru, 31 Maret 2020

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Pembimbing II

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Drs. Zulkifli, M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Pasca sarjana Universitas Islam Riau

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lili Suryani
NPM : 177122069
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Penelitian : Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai kota kecamatan Dumai kota-kota Dumai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2020

Pembuat pernyataan



Lili Suryani



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 354/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Lili Suryani
NPM : 177122069
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 26 Maret 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi,
Magister Ilmu Administrasi

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Staff Perpustakaan

Sumardiono, S.I.P



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN DUMAI KOTA
KECAMATAN DUMAI KOTA - KOTA DUMAI

by Lili Suryani



From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis 2)

- Processed on 26-Mar-2020 10:58 +08
- ID: 1282248304
- Word Count: 19012

Similarity Index

21%

Similarity by Source

Internet Sources:

20%

Publications:

2%

Student Papers:

17%

sources:

- 1 2% match (Internet from 03-Apr-2017)
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1521/848>
- 2 2% match (Internet from 06-Aug-2019)
<https://docplayer.info/138895075-Implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-di-kecamatan-mambi-kabupaten-mamasa.html>
- 3 2% match (Internet from 04-Jul-2019)
[https://www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal%20SAHRIA%20\(02-12-18-05-26-07\).doc](https://www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal%20SAHRIA%20(02-12-18-05-26-07).doc)
- 4 2% match (student papers from 03-May-2018)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03
- 5 1% match (Internet from 24-Nov-2018)
<https://docplayer.info/67284753-Dewi-zulyanti-npm.html>
- 6 1% match (Internet from 05-Mar-2020)
<https://es.scribd.com/document/396940537/0931088901-Buku-Sekebki-pdf>
- 7 1% match (Internet from 31-Oct-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/59700/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 8 1% match (Internet from 07-Jul-2014)
<http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-asnaaneta-173-1-asnaane-a.pdf>
- 9 1% match (Internet from 15-Jan-2019)
<http://pelintungdumai.blogspot.com/2015/11/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-seksi.html>
- 10 1% match (Internet from 15-Jan-2019)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 178/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Rizka Hidayanti** tanggal 19 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

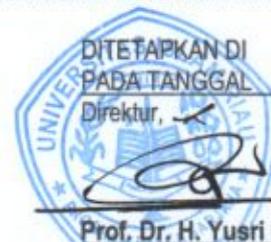
| No | Nama | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|----|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Dr. H. Syafhendry, M.Si | Lektor Kepala | Pembimbing I |
| 2 | Drs. Zulkifli, M.Si | Lektor | Pembimbing II |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **LILI SURYANI**
 N P M : **177122069**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN DUMAI KOTA KECAMATAN DUMAI KOTA-KOTA DUMAI".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 21 April 2020

Direktur, <

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
 NIP. 19540808 1987011 002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN DUMAI KOTA KECAMATAN DUMAI KOTA – KOTA DUMAI

ABSTRAK

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan taraf permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara perperiode di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota. Indikator penilaian yang digunakan meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kelurahan Dumai Kota Ini adalah Survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi peneliti. Total keseluruhan sampel ada 15 orang. Teknik sampling yang dipergunakan adalah *Sensus* dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer, yang dikumpulkan dengan teknik kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah *Rating scale*. Berdasarkan teknik analisa data *rating scale* dari 50 responden penelitian diperoleh skor dengan total score 2480 atau dengan presentase 91.85% yang berada pada kategori baik.

Kata kunci: Evaluasi, Program, Sasaran, Perencanaan

**PROGRAM EVALUATION CITY WITHOUT SLUM IN DUMAI VILLAGE
CITY DUMAI CITY – DUMAI CITY**

ABSTRACT

KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Program is a prevention and quality improvement program for national slums. The target of this program is to achieve the reduction of urban slum areas to 0 Ha through prevention and improvement of slum settlements covering an area of 38,431 Ha which is carried out periodically throughout Indonesia. This study aims to determine the evaluation of the city program without slums in Dumai Kota Kelurahan. The assessment indicators used include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This type of research located in the Kelurahan Dumai Kota This is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire as a primary data collection tool to analyze the empirical conditions of the objective existence of research objectives at the research location. In total there are 15 people in the sample. The sampling technique used is the Census where the entire population is sampled. Types and data collection techniques used consist of primary data, collected by questionnaire and interview techniques and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is Rating scale. Based on the scale rating data analysis techniques of 50 research respondents obtained a score with a total score of 2480 or with a percentage of 91.85% which is in the good category.

Keywords: Evaluation, Program, Target, Planning

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sesuai dengan yang penulis rencanakan. Tesis ini berjudul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai”.

Penulis dengan segala kemampuan yang ada telah berupaya maksimal untuk menyusun tesis ini, namun demikian penulis menyadari jika masih ada kekhilafan dalam penulisan baik itu kaidah penulisan maupun isi tulisan, penulis sangat berharap kepada semua pihak untuk dapat berkenan memberikan saran pendapat dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam dan tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian proposal tesis ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Bahar dan Ibunda Ramlah yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan doa restu sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Suami saya Amdani dan Putri tercinta Dzakiera Al Aruna, serta abang, kakak, adik dan keluarga besar saya yang juga menjadi motivator tersendiri bagi penulis untuk bersemangat menyelesaikan pendidikan.

3. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menuntaskan pendidikan dilembaga ini.
4. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah memberikan berbagai fasilitas belajar dengan penuh kenyamanan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana ini dalam waktu yang sesuai dengan yang direncanakan.
5. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Yth. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan judul proposal yang penulis ajukan dapat segera disetujui.
6. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasihat akademis sehingga Proposal tesis ini dapat segera diseminarkan.
7. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku Pembimbing II memberi arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen khususnya pada program studi Ilmu Administrasi yang telah mencurahkan keilmuannya kepada penulis sehingga penulis juga dapat menambah wawasan keilmuan yang Insha Allah akan bermanfaat bagi semua pihak.

9. Koordinator Kota II Riau beserta perangkat pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh yang telah membantu memberikan informasi tentang Program Kota Tanpa Kumuh
10. Seluruh rekan-rekan sesama kuliah terkhusus program studi Ilmu Administrasi Publik kelas A angkatan 2018 yang juga menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian Proposal Tesis ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan dan Karyawati, Kepala Tata Usaha beserta staf serta pustakawan, tenaga keamanan serta tenaga penyedia konsumsi di Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah tulus ikhlas melayani kami semua selama perkuliahan di Program Magister Pascasarjana ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis tidak dapat membalas akan semua kebaikannya, namun semua penulis serahkan kepada Allah SWT semoga menjadi tambahan nilai ibadah yang akan memberi kebaikan di dunia dan keselamatan diakhirat.

Akhir kata penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Ttd

Lili Suryani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 16 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 16 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, KONSEP | |
| OPERASIONAL | 18 |
| 2.1. Tinjauan Pustaka..... | 18 |
| 2.1.1. Konsep Administrasi..... | 18 |
| 2.1.2. Kebijakan Sosial | 24 |
| 2.1.3. Teori dan Proses kebijakan Publik | 26 |
| 2.1.4. Evaluasi Kebijakan | 27 |
| 2.1.5. Lingkungan Evaluasi Kebijakan | 30 |
| 2.1.6. Konsep Evaluasi Program..... | 31 |

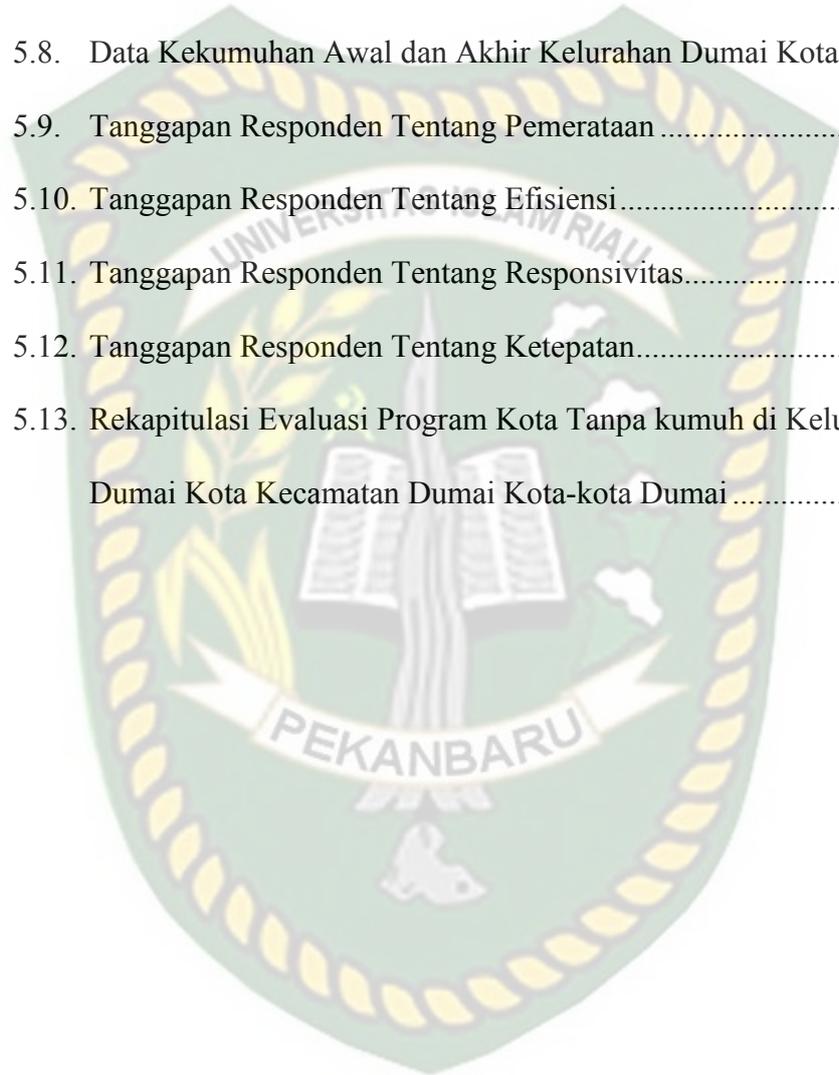
| | | |
|--|---|-----------|
| 2.2. | Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)..... | 32 |
| 2.2.1. | Tahap Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Tingkat Kabupaten/Kota Dan Tingkat Kelurahan/Desa..... | 31 |
| 2.3. | Kerangka Pemikiran..... | 41 |
| 2.4. | Hasil Penelitian Terdahulu..... | 42 |
| 2.5. | Konsep Operasional..... | 43 |
| 2.6. | Operasionalisasi Variabel..... | 44 |
| 2.7. | Teknik Pengukuran..... | 46 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 51 |
| 3.1. | Tipe Penelitian..... | 51 |
| 3.2. | Lokasi Penelitian..... | 51 |
| 3.3. | Populasi dan Sampel..... | 52 |
| 3.4. | Jenis dan Sumber Data..... | 53 |
| 3.4.1. | Data primer..... | 53 |
| 3.4.2. | Data Sekunder..... | 53 |
| 3.5. | Teknik pengumpulan Data..... | 54 |
| 3.6. | Teknik Analisa Data..... | 55 |
| 3.7. | Jadwal Kegiatan Penelitian..... | 57 |
| BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... | | 59 |
| 4.1. | Sejarah Ringkas Kelurahan Dumai Kota..... | 59 |
| 4.2. | Keadaan Komposisi Pegawai Kelurahan Dumai Kota..... | 64 |
| 4.3. | Struktur Organisasi dan rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Dumai Kota..... | 68 |

| | |
|---|------------|
| 4.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota | 77 |
| BAB V DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... | 79 |
| 5.1. Identitas responden | 79 |
| 5.2. Analisa data dan Hasil penelitian..... | 81 |
| 5.3 Faktor Pendukung dan penghambat Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota | 101 |
| BAB VI Penutup..... | 104 |
| 6.1. Kesimpulan | 104 |
| 6.2. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| I.1. Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh..... | 3 |
| 1.2. Luas Kawasan Kumuh Kota Dumai | 5 |
| 1.3. Rencana Kerja Program Kota Tanpa Kumuh | 9 |
| 1.4. Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2018 | 12 |
| 1.5. Lokasi Dan Realisasi Pengurangan Kumuh Perkotaan..... | 15 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 42 |
| 2.2. Operasional Variabel | 44 |
| 3.1. Populasi Dan Sampel | 52 |
| 3.2. Jadwal Penelitian | 57 |
| 4.1. Jumlah RT dan Masyarakat Dumai Kota..... | 62 |
| 4.2. Jenis Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Dumai Kota | 63 |
| 4.3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 65 |
| 4.4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan..... | 65 |
| 4.5. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... | 66 |
| 4.6. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja | 67 |
| 4.7. Sarana dan Prasarana | 77 |
| 5.1. Responden Berdasarkan Tingkat Umur | 80 |
| 5.2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 81 |
| 5.3. Tanggapan Responden Tentang Efektifitas | 82 |
| 5.4. Realisasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota . | 84 |

| | |
|---|----|
| 5.5. Tanggapan Responden Tentang Efisiensi..... | 85 |
| 5.6. Target dan Realisasi Program Kota Tanpa Kumuh | 87 |
| 5.7. Tanggapan Responden Tentang Kecukupan..... | 88 |
| 5.8. Data Kekumuhan Awal dan Akhir Kelurahan Dumai Kota | 90 |
| 5.9. Tanggapan Responden Tentang Pemerataan | 92 |
| 5.10. Tanggapan Responden Tentang Efisiensi..... | 93 |
| 5.11. Tanggapan Responden Tentang Responsivitas..... | 95 |
| 5.12. Tanggapan Responden Tentang Ketepatan..... | 97 |
| 5.13. Rekapitulasi Evaluasi Program Kota Tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-kota Dumai | 99 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 2.1. Tahap Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa..... | 38 |
| 2.2 Kerangka Berpikir tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai..... | 41 |
| 4.1. Struktur Organisasi Pegawai Kantor Lurah Dumai Kota..... | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kuisisioner..... | 105 |
| 2. Tanggapan Responden..... | 108 |
| 3. Draf Wawancara..... | 110 |
| 4. Dokumentasi Wawancara dengan Lurah..... | 116 |
| 5. Dokumentasi Sebelum Program Kota Tanpa Kumuh..... | 117 |
| 6. Dokumentasi Sesudah Program Kota Tanpa Kumuh..... | 119 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Istilah pembangunan berasal dari kata "bangun", berarti sadar, siaman, bangkit, berdiri. Lebih lengkap lagi menurut Raharjo pembangunan adalah Proses yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembagunan demi keberlangsungan hidupnya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kehidupan yang baik menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang

rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut.

Adapaun pembagunan yang dimaksud adalah pembagunan infrastruktur berbasis masyarakat dalam pemungkiman kumuh yang ada di kota yang juga menjadi bagian dari masalah kesejahteraan yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Pemungkiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman jelas disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Untuk mewujudkan isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka dibentuk Salah satu program pemerintah dalam mengurangi pemukiman kumuh yang ada di Indonesia yaitu Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan di 34 Provinsi, yang tersebar di 269 Kabupaten/Kota, pada 11.067 Desa/Kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kota Tanpa Kumuh adalah seluas 24.650 Hektare¹

Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dimaksud untuk

¹ peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

membangun sistem yang terpadu untuk penanganan pemukiman kumuh, dimana pemerintah daerah menjalankan program kota tanpa kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan masyarakat. Adapun kriteria Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu;

Tabel I.1

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh

| No | Kriteria | Keterangan |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bangunan gedung | Bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detil tata ruang (rdtr), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (rtbl), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan. |
| 2 | Jalan lingkungan | Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk/penyediaan air minum |
| 3 | Penyediaan air minum | Merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 L (enam puluh liter)/orang/hari |
| 4 | Drainase lingkungan | Merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia |
| 5 | Pengelolaan air limbah | Merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. |
| 6 | Pengelolaan persampahan | Merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Pewadahan dan pemilahan domestik; b) Pengumpulan lingkungan; c) Pengangkutan lingkungan; dan d) Pengolahan lingkungan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------|---|
| 7 | Proteksi kebakaran | Merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi pasokan air dari sumber alam maupun buatan, jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; dan sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran. |

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa kriteria daerah yang mendapatkan program Kota Tanpa Kumuh yaitu daerah yang Bangunan gedung, Jalan lingkungan, Penyediaan air minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan persampahan dan Proteksi kebakaran yang tidak memadai.

Kegiatan infrastruktur yang dibangun melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah infrastruktur yang secara langsung berkontribusi mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, utamanya terkait penyelesaian permasalahan 7+1 indikator kumuh.

Evaluasi dalam penyelenggaraan infrastruktur sakala lingkungan harus terintegrasi dengan infrastruktur skala kota/jaringan infra kota dan difokuskan pada lokasi permukiman kumuh prioritas, sehingga penanganan pada lokasi tersebut dapat tuntas. Sebagai wujud tanggungjawab bersama, pemerintah pusat melalui program KOTAKU mengalokasi sebagian kecil dari kebutuhan dana investasi upaya pencegahan maupun peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan dana investasi diharapkan dapat disediakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan infrastruktur skala lingkungan umumnya memerlukan perencanaan yang lebih sederhana, biaya yang tidak terlalu besar, teknologi sederhana, resiko kecil dan biaya pemeliharaan yang kecil sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan secara partisipatif dan swakelola oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Fasilitator kelurahan/desa. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur skala lingkungan perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur skala kota, sehingga terjadi koneksitas antara kegiatan skala lingkungan dengan sistem kotanya.

Berdasarkan peraturan kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.01.03-CK/226 perihal Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Kota Dumai Provinsi Riau, maka terbentuklah Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 831/Bappeda/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai No.448/Bappeda/2015 tentang Lokasi Lingkungan Dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai telah tunjuk beberapa kelurahan yang menjadi target program Kota Tanpa Kumuh.

Tabel I.2
Luas Kawasan Kumuh Kota Dumai

| No | Kawasan | Kecamatan | Kelurahan | Rukun Tetangga (RT) | Luas RT (Ha) |
|----|---------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Laksamana Rimba Sekampung | Dumai Kota | Laksamana | RT001 | 3,88 |
| | | | | RT002 | 3,27 |
| | | | | RT003 | 2,27 |
| | | | | RT004 | 0,60 |
| | | | | RT005 | 0,25 |
| | | | | RT006 | 4,60 |

| No | Kawasan | Kecamatan | Kelurahan | Rukun Tetangga (RT) | Luas RT (Ha) |
|----|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Rimba Sekampung | RT007 | 1,55 |
| | | | | RT003 | 1,33 |
| | | | | RT004 | 2,24 |
| | | | | RT005 | 0,59 |
| | | | | RT008 | 0,97 |
| 2 | Dumai Kota | Dumai Kota | Dumai Kota | RT001 | 1,09 |
| | | | | RT002 | 0,40 |
| | | | | RT005 | 0,92 |
| | | | | RT006 | 0,72 |
| | | | | RT007 | 0,74 |
| | | | | RT010 | 1,50 |
| | | | | RT014 | 0,95 |
| 3 | Bukit Bintang Jadi | Dumai Kota Dan Dumai Selatan | Bukit Datuk | RT002 | 0,79 |
| | | | | RT003 | 1,40 |
| | | | | RT004 | 1,46 |
| | | | | RT005 | 4,04 |
| | | | Bintang | RT006 | 0,38 |
| | | | | RT016 | 1,62 |
| | | | | RT017 | 1,02 |
| | | | Sukajadi | RT018 | 0,90 |
| | | | | RT020 | 2,80 |
| | | | | RT021 | 3,17 |
| | | | | RT022 | 0,38 |
| | | | | RT023 | 3,50 |
| | | | | | |
| 4 | STDI Rimba Sekampung | Dumai Barat Dan Dumai Kota | Simpang Tetap Darul Ihsan | RT001 | 2,06 |
| | | | | RT002 | 2,41 |
| | | | | RT003 | 0,96 |
| | | | | RT014 | 1,75 |
| | | | Rimba Sekampung | RT013 | 1,94 |
| | | | | RT014 | 1,05 |
| | | | | RT019 | 0,80 |
| | | | | RT020 | 1,00 |
| | | | | RT021 | 1,00 |
| | | | | RT022 | 1,00 |
| | | | | | |
| 5 | Pangkalan | Dumai Barat | Pangkalan Sesai | RT005 | 2,66 |
| | | | | RT006 | 3,28 |
| | | | | RT007 | 3,04 |
| | | | | RT009 | 2,32 |
| 6 | Buluh Kasap | Dumai Timur | Buluh Kasap | RT001 | 2,90 |
| | | | | RT005 | 1,18 |

| No | Kawasan | Kecamatan | Kelurahan | Rukun Tetangga (RT) | Luas RT (Ha) |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | RT006 | 1,05 |
| | | | | RT011 | 2,02 |
| 7 | Mukti Palas | Dumai Timur | Jaya Mukti | RT017 | 3,40 |
| | | | | RT021 | 3,27 |
| | | | | RT022 | 3,88 |
| | | | Tanjung Palas | RT023 | 3,46 |
| | | | | RT006 | 2,40 |
| RT007 | 4,59 | | | | |
| 8 | Teluk Binjai | Dumai Timur | Teluk Binjai | RT005 | 4,27 |
| | | | | RT006 | 1,00 |
| | | | | RT008 | 1,00 |
| | | | | RT009 | 1,75 |
| | | | | RT020 | 1,14 |
| 9 | Bumi Ayu | Dumai Selatan | Bumi Ayu | RT002 | 4,11 |
| | | | | RT003 | 1,36 |
| | | | | RT008 | 0,14 |
| 10 | Ratu Sima | Dumai Selatan | Ratu Sima | RT001 | 1,08 |
| | | | | RT002 | 1,00 |
| | | | | RT005 | 4,00 |
| | | | | RT009 | 1,00 |
| | | | | RT014 | 3,00 |

Sumber : Walikota Dumai Nomor 831/Bappeda/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai No.448/Bappeda/2015 tentang Lokasi Lingkungan Dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai.

Salah satu Kelurahan yang mendapatkan program tersebut adalah Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai. Kelurahan Dumai Kota merupakan kelurahan yang berada tepat di pusat kota Kota Dumai dan kekumuhan kelurahan Dumai Kota membuat pusat kota kurang enak untuk dilihat. Kelurahan Dumai Kota dikatakan kumuh karena pembangunan bangunan yang tidak rapih, kawasan pemukiman yang kotor, sarana dan prasarana masih dikatakan tidak lengkap, rumah yang tidak layak huni, drainase yang rusak, pemukiman yang selalu terkena banjir, dan kondisi jalan yang tidak bagus.

Munculnya program Kota Tanpa Kumuh menjadi pendukung dalam terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni yang dipimpin oleh pemerintahan yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan, implementasi bahkan evaluasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program tersebut sebagai program yang mampu menanggulangi kemiskinan dan pemukiman kumuh diperkotaan.

Dalam mewujudkan program perlu adanya perencanaan yang digunakan untuk menentukan arah dari kebijakan yang telah ditetapkan dan juga sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun perencanaan yang dimaksud dapat dilihat dari tabel I.3 berikut ini ;

**Tabel 1.3 Rencana Kerja Tahunan Kota Tanpa Kumuh
Kelurahan Dumai Kota Tahun 2017-2021**

| No | Tahun | Sub Komponen Kegiatan | | Detail Sub Komponen Kegiatan | | Lokasi Kegiatan | |
|----|-------|-----------------------|---|---|-----------------|-----------------|--------|
| | | Kegiatan | Aspek Perkumuhan | Lokasi | Jumlah Kegiatan | Satuan | Volume |
| 1 | 2017 | Peningkatan SDM | Pelatihan Keterampilan | KELURAHAN | 1 | 30 | orang |
| 2 | 2017 | Jalan | Jalan Beton | RT013 | 1 | 100 | meter |
| 3 | 2017 | Drainase | Drainase Lingkungan | RT013 | 1 | 110 | meter |
| 4 | 2018 | Proteksi Kebakaran | Motor Pemadam Kebakaran | RT010-RW000 | 1 | 1 | unit |
| 5 | 2018 | Perdagangan | Perdagangan | Kelurahan | 1 | 20 | orang |
| 6 | 2018 | Peningkatan SDM | Pelatihan Bidang Pertukangan | KELURAHAN | 1 | 15 | orang |
| 7 | 2019 | Drainase | Drainase Lingkungan | RT007 | 1 | 300 | meter |
| 8 | 2019 | Drainase | Drainase Lingkungan | RT010 | 1 | 250 | meter |
| 9 | 2019 | Air Bersih | Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris | RT001 | 1 | 1 | unit |
| 10 | 2019 | Air Bersih | Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris | RT002 | 1 | 1 | unit |
| 11 | 2019 | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | RT002,RT005,RT006,RT007,RT010,RT014 | 6 | 6 | unit |
| 12 | 2019 | Jasa | Jasa | Kelurahan | 1 | 30 | orang |
| 13 | 2020 | Jalan | Jalan Beton | RT002, RT004, RT005, RT006, RT007 | 1 | 610 | meter |
| 14 | 2020 | Drainase | Drainase Lingkungan | RT002, RT003, RT004, RT005, RT006, RT008, | 1 | 860 | meter |
| 15 | 2020 | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | RT003, RT005, RT010, RT015 | 1 | 13 | unit |
| 16 | 2020 | Perumahan | Penataan Rumah Deret/Rumah Susun | RT003 | 1 | 3 | unit |
| 17 | 2020 | MCK | MCK Mandi + Cuci + Kakus | RT002-RW000 RT004, RT006, RT009, | 1 | 8 | unit |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|--|--|---|------|-------|
| | | | | RT011, RT012 | | | |
| 18 | 2020 | Industri Skala Rumah Tangga | Industri Skala Rumah Tangga | Kelurahan | 1 | 50 | orang |
| 19 | 2020 | Peningkatan SDM | Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga | KELURAHAN | 1 | 15 | orang |
| 20 | 2021 | Jalan | Jalan Beton | RT009, RT010, RT011, RT012, RT014 | 1 | 650 | meter |
| 21 | 2021 | Drainase | Drainase Lingkungan | RT008, RT009, RT011, RT012, RT013, RT014 | 1 | 1060 | meter |
| 22 | 2021 | Perumahan | Rehab/perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | RT020 | | 13 | unit |
| 23 | 2021 | Perdagangan | Perdagangan | Kelurahan | 1 | 30 | orang |
| 24 | 2021 | Peningkatan SDM | Pelatihan Kewirausahaan | KELURAHAN | 1 | 20 | orang |

Sumber Data Investasi Kotaku Tahun 2018



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rencana kerja Program Kotaku di kelurahan Dumai Kota dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ada tiga aspek yaitu Lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Adapun kegiatan yang termasuk dalam aspek Lingkungan antara lain: drainase, air bersih, jalan, perumahan, MCK dan proteksi kebakaran. Dalam aspek Ekonomi yaitu: perdagangan, jasa dan industri skala rumah tangga. Sedangkan dalam aspek sosial yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kegiatan penanganan kumuh untuk berkelanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi pemukiman kumuh.

Sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkan Rencana kerja maka perlu adanya penyusunan anggaran. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan tahap awal dari rangkaian pelaksanaan suatu kegiatan. RKA digunakan untuk mendaftarkan dan merencanakan program-program kerja dan anggaran tiap-tiap unit, agar pengalokasian keuangan lembaga dapat selalu terencana. Lebih dari itu dengan adanya RKA ini setiap unit diharapkan mampu merencanakan kegiatan-kegiatannya di tahun berikutnya, sehingga dapat dikelola dengan baik oleh unit itu sendiri. Adapun Rencana Kerja dan Penganggaran Program Kota Tanpa Kumuh tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1.4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

| KELURAHAN | ALOKASI BDI (RP) | BOP BKM (RP) | Lokasi Kegiatan (Dusun/Lingkungan/RT/RW) | Luas Kumuh RT Flag 1 (Ha) | Data KSM | | | | USULAN INVESTASI INFRASTRUKTUR | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--|---------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | Nama KSM | Alamat KSM | Jumlah Anggota | | Tahun Anggaran DIPA | Kategori penanganan Baru/Rehab | Detail Sub komponen | Volume | Satuan (M/Unit /M2) | Biaya (Rp) | | |
| | | | | | | | Laki-laki | Perempuan | | | | | | BDI | Swadaya | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DUMAI KOTA | 133,653,000 | 5,000,000 | RT001-RW000 | 1.09 | TENAGA | RT001-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Jalan Beton | 91 | meter | 133,653,000 | 8,000,000 | 141,653,000 |
| DUMAI KOTA | 45,000,000 | | RT002-RW000/RT001-RW000 | 1.09 | TENAGA | RT002-RW000/RT001-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Gerobak/Motor Sampah | 1 | unit | 45,000,000 | 2,700,000 | 47,700,000 |
| DUMAI KOTA | 96,140,000 | | RT001-RW000 | 1.09 | TULANG | RT001-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Drainase Lingkungan | 91 | meter | 96,140,000 | 5,750,000 | 101,890,000 |
| DUMAI KOTA | 179,484,000 | | RT002-RW000 | 0.40 | WARSA 1 | RT002-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Jalan Beton | 98 | meter | 179,484,000 | 10,750,000 | 190,234,000 |
| DUMAI KOTA | 98,390,000 | | RT002-RW000 | 0.40 | WARSA 2 | RT002-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Drainase Lingkungan | 88 | meter | 98,390,000 | 5,900,000 | 104,290,000 |
| DUMAI KOTA | 80,000,000 | | RT010-RW000 | 0.74 | WARSA 2 | RT002-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Motor pemadam kebakaran | 1 | Unit | 80,000,000 | 4,800,000 | 84,800,000 |
| DUMAI KOTA | 130,657,000 | | RT014-RW000 | 0.95 | PEDULI | RT014-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Jalan Beton | 77 | meter | 130,657,000 | 7,800,000 | 138,457,000 |
| DUMAI KOTA | 68,320,000 | | RT014-RW000 | 0.95 | PEDULI | RT014-RW000 | 5 | 2 | 2018 | Baru | Drainase Lingkungan | 56 | meter | 68,320,000 | 4,100,000 | 72,420,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|-------------|------|------------|-------------|---|---|------|-------|---------------------|-----|-------|-------------|-----------|-------------|
| DUMAI KOTA | 163,356,000 | | RT010-RW000 | 0.74 | LINGKUNGAN | RT010-RW000 | 5 | 2 | 2018 | REHAB | Drainase Lingkungan | 162 | meter | 163,356,000 | 9,800,000 | 173,156,000 |
|------------|-------------|--|-------------|------|------------|-------------|---|---|------|-------|---------------------|-----|-------|-------------|-----------|-------------|

Sumber data investasi kotaku tahun 2018

Keterangan:

- BDI : Bantuan Dana Investasi
 BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
 BOP : Biaya Operasional
 KSM : Kelompok swadaya masyarakat



Dari tabel rencana kerja dan anggaran thn 2018 diatas dapat dilihat bahwa dikelurahan Dumai Kota ada 4 RT yang mendapat bantuan merehab infrastruktur, antara lain RT 001 rehab jalan beton dan gerobak/motor sampah. RT 002 rehab jalan beton, gerobak/motor sampah dan drainase lingkungan. RT 010 rehab motor pemadam kebakaran dan drainase lingkungan. Sedangkan RT 014 rehab jalan beton dan membuat baru drainase lingkungan. Dan dana yang digunakan dalam Rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan infrastruktur berasal dari BDI (bantuan dana investasi) dan swadaya masyarakat.

Setelah perencanaan telah selesai maka barulah bisa melihat seperti apa implementasi dari sebuah program tersebut. Kemudian setelah implementasi berjalan maka bisa dilakukan evaluasi terhadap program yang telah dikerjakan. Wirawan (2012:7) menjelaskan Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dalam evaluasi juga dikenal tentang evaluasi program, Ralp Tyler, 1950 (dalam Farida, 2008) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi

Kemudian yang dimaksud evaluasi dalam judul ini untuk melihat sejauh mana program yang dilakukan oleh anggota KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) mengenai pembangunan berbasis kepada masyarakat agar program berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah telah mencapai tujuannya, serta apakah kebijakan tersebut memberi dampak yang baik bagi masyarakat

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 831/Bappeda/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai No.448/Bappeda/2015 tentang Lokasi Lingkungan Dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai menyatakan Lokasi dan Realisasi Pengurangan Kumuh Perkotaan Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2018 berdasarkan tabel 1.5 di bawah ini

Tabel 1.5
Lokasi dan Realisasi Pengurangan Kumuh Perkotaan Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2018

| Kawasan | Kelurahan | Rukun Tetangga (RT) | Luas RT (Ha) | Luas Kawasan Awal (Ha) | Pengurangan Kumuh | | | Luas Kawasan Yang Belum Terealisasi S/D Tahun 2018 (Ha) |
|------------|------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|------|--------------|---|
| | | | | | 2017 | 2018 | Belum Tuntas | |
| Dumai Kota | Dumai Kota | RT001 | 1,09 | 6,32 | - | 1,09 | - | 1,46 |
| | | RT002 | 0,40 | | - | 0,40 | - | |
| | | RT005 | 0,92 | | - | 0,92 | - | |
| | | RT006 | 0,72 | | - | - | 0,62 | |
| | | RT007 | 0,74 | | - | - | 0,74 | |
| | | RT010 | 1,50 | | - | 1,50 | - | |
| | | RT014 | 0,95 | | - | 0,95 | - | |

Sumber Keputusan walikota Dumai nomor 831/bappeda/2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota belum tuntas menjadi 0 Ha. Pada kelurahan Dumai Kota terdapat dua RT yaitu RT 006 dengan luas kawasan yang belum terealisasi 0,62 Ha dan RT 007 dengan luas kawasan yang belum terealisasi seluas 0,74 Ha. Dengan jumlah luas kawasan kumuh yang belum terealisasi di Kelurahan Dumai Kota yaitu 1,46 Ha.

Melalui gejala masalah yang timbul, serta berdasarkan keterangan data-data yang diperoleh, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan, antar lain sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hasil dari program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota .
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai tambahan informasi bagi Pemerintrah Daerah dan Masysrakat dalam mengevaluasi program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota

- b. Sebagai sumbangan informasi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dan meningkatkan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang studi Ilmu Administrasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN KONSEP OPERASIONAL

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare* yang artinya melayani, membantu atau memenuhi”, serta *administration* yang artinya “memberi bantuan, memelihara, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan serta pengelolaan”.

Administrasi disebut juga sebagai ketatausahaan yang jika dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Clerical work*, *paper work* atau *office work* sedangkan administrasi jika dilihat dalam arti sempit yaitu kegiatan pencatatan, pengolahan, pengiriman berbagai nomor, surat menyurat, pengetikan, pengandaan, pengarsipan, pengiriman berbagai informasi baik itu yang diterima maupun yang keluar oleh suatu organisasi/institusi (Wirman Syafri, 2012:3)

Dalam arti luas administrasi didefinisikan sebagai rangkaian proses kegiatan usaha kerjasama dua orang atau lebih secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa administrasi terkandung hal-hal berikut:

- a. Kelompok orang (Man), yakni tempat berkumpulnya dua orang atau lebih dalam suatu organisasi baik itu organisasi sipil atau militer, negeri atau swasta, maupun besar atau kecil.

- b. Kegiatan, yakni segala macam aktivitas yang harus dikerjakan baik secara individual, maupun secara bersama-sama atau berkelompok untuk mencapai suatu tujuan
- c. Kerja sama, yakni interaksi antar individu maupun kelompok dalam menyelesaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan tersebut tidak akan bias di selesaikan seorang diri (Wirman Syafri,2012:4)

Menurut *John M. Pfiftner* dan *Robert V Presthus* dalam Wirman Syafri (2012:7) mengemukakan bahwa administrasi merupakan suatu proses umum yang menandai semua usaha kerja sama. Kemudian menurut *Hetbert A Simon, Donal W, Smithburg dan A. Thomson* dalam Wirman Syafri (2012:8) mendefinisikan administrasi dalam arti luas yaitu kerja sama sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan tiga ide pokok, yakni sebagai berikut :

1. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan
2. Kegiatan yang dillaksanakan bersama-sama atau berkelompok
3. Kerangka kerja sama berdasarkan tujuan bersama (Wilman Syafri2012:8)

Dalam artian sederhana administrasi didefinisikan sebagai segala tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud dan tujuan (*John A Vieg*). Kemudian menurut *Brooks Adams* dalam Wilman Syafri (2012:8), administrasi adalah kemampuan dalam mempengaruhi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan social hingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat berkolaborasi menjadi satu kesatuan.

Leonard D. White dan *Wilman Syafri* (2012:9) menyatakan administrasi merupakan suatu proses yang pasti terdapat dalam setiap organisasi baik itu organisasi bersifat public atau privat, sipil atau militer, dalam skala besar ataupun kecil. Kemudian *Sondang P. Siagian* dalam *Wilman Syafri* (2012:9) juga mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ide pokok yang terdapat dalam administrasi adalah serangkaian kegiatan kerja yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan wadah serangkaian kegiatan tersebut adalah organisasi. Dan batasan administrasi secara lengkap menurut *Wirman Syafri* (2012:11) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama oleh sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun unsur-unsur yang bersinergi dalam administrasi menurut *Wilman Syafri* (2012:12) antara lain :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalaan
7. Tata usaha
8. Hubungan masyarakat

Kimbal Young memberikan beberapa definisi tentang Publik yaitu :

1. Orang
2. Keseluruhan anggota suatu komunitas, bangsa atau masyarakat
3. Sekumpulan individu dan berbagai kepentingan yang sama.

Menurut *Scott M. Cutlip* dan *Allen H. Center* dalam Wirman Syafri (2012:15) public adalah sekumpulan orang yang saling terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Menurut *Ensiklopedi Administrasi* [Pariata Westra, Sutarto, dan Ibnu Syamsi, (ed)] dalam Wirman Syafri (2012:15): Publik adalah sejumlah orang (yang tidak mesti berada dalam satu tempat) yang dipersatukan oleh kepentingan yang sama, yang berbeda dengan kelompok orang lain.

Selanjutnya dalam konteks organisasi, publik dapat digolongkan menjadi:

1. Publik internal, yakni publik dalam lingkungan suatu instansi/perusahaan, misalnya dalam suatu perusahaan mulai dari penjaga malam sampai presiden direktornya, adalah publik intern dari perusahaan tersebut.
2. Publik eksternal, yakni publik di luar organisasi, instansi/perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan instansi/perusahaan tadi.

Administrasi publik menurut *Pfiffner & Presthus* dalam Wirman Syafri (2012:20) adalah sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik. Sedangkan menurut Nigro & Nigro dalam Wirman Syafri (2012:20), administrasi publik adalah:

1. Adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara;

2. Meliputi ketiga cabang eksekutif (pemerintahan), legislatif (DPR), dan yudisial/yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya;
3. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian proses politik
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta;
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut *Rosenbloom and Goldavan* dalam Wirman Syafri (2012:20) administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagu pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat. Sedangkan menurut *Levine, Peters and Thomson* dalam Wirman Syafri (2012:21) administrasi publik memusatkan perhatiannya pada berbagai kebijakan dan program organisasi pemerintah, termasuk perilaku para pejabat (yang biasanya tidak dipilih) yang secara formal bertanggung jawab atas perilaku mereka.

Menurut *Dwigh Waldo* dalam Wirman Syafri (2012:21) administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan menurut *Woodrow Wilson dalam* Wirman Syafri (2012:21) administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan mi oleh usaha privatakan dipenuhasyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan terpenuhi oleh usaha privat/swasta.

Marshall Edward Dimock & Gladys Ogden Dimock dalam Wirman Syafri (2012:22) menyatakan adadministrasi publik adalah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuatan kebijakan pokok di dalam pemerintahan.

Sedangkan menurut *Leonard D. White* dalam Wirman Syafri (2012:22) jika dilihat dari arti luas administrasi adalah semua kegiatan yang melaksanakan dan memaksakan kebijakan public atau lkebijakan umum. Menurut Sondang P. Siagian dalam Wirman Syafri (2012:25) administrasi public didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Jika diperhatikan, substansi sebagian besar definisi diatas sama, yaitu menyangkut kerja sama kelompok orang dalam lingkup organisasi Negara (legislative, eksekutif dan yudikatif) untuk mencapai tujuan Negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi dari definisi-definisi administrasi publik yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah berbagai proses dalam mengumpulkan, merumuskan,, menjalankan berbagai kebijakan atau program untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan Negara yang efisien serta berkeadilan social.

2.1.2 Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial juga bagian dari kebijakan publik dimana merupakan kebijakan Negara yang dibuat untuk menanggapi berbagai isu public, serta mengatasi berbagai masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Kebijakan sosial juga dirancang untuk mencegah terjadinya berbagai masalah sosial, Kebijakan sosial juga adalah keputusan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah, mengatasi berbagai masalah sosial serta mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal lainnya, kebijakan sosial juga diartikan sebagai aspek sosial, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, sebagai panduan administrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Arto, 2011:13-11). Kebijakan sosial memiliki sejumlah dimensi (Edi Suharto, 2011:10-11), yakni:

1. Sebagai proses, kebijakan sosial dapat dilihat sebagai suatu dinamika dan perubahan perumusan suatu kebijakan terhadap variable-variabel sosio politik dan juga teknik metodologi.
2. Kebijakan sosial adalah suatu proses urutan atau pengembangan perencanaan.
3. Sebagai suatu produk kebijakan dilihat sebagai bagian akhir dari suatu proses.

4. Sebagai kinerja. Kebijakan sosial merupakan gambaran dari hasil-hasil pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan sosial digunakan untuk memecahkan atau mengatasi masalah sosial dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempermudah serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Kebijakan sosial selalu mengutamakan pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial mengandung dua arti yang saling berkaitan yakni pemecahan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Menurut Edi Suharto (2011:107) adapun agenda kebijakan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan industrialisasi dan modernisasi.
- b. Perkembangan masalah sosial khusus.
- c. Perkembangan kependudukan dan urbanisasi
- d. Pertumbuhan ekonomi dan tuntutan pemerataan.
- e. Perkembangan hubungan internasional.

Edi Suharto (2011:108) juga mengatakan kegagalan kebijakan social sering terjadi bukan karena adanya kebijakan social itu sendiri, melainkan dari beberapa factor lainnya:

1. Proses perumusan kebijakan yang kurang tepat, informasi yang tidak memadai dan tidak akurat, metodologi yang kurang tepat, atauperumusan kebijakan yang tidak mampu untuk di realisasikan menjadi salah satu penyebab gagalnya kebijakan sosial.
2. Perencanaan dan pelaksanaan tidak sejalan.
3. Kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan.

4. Kebijakan tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
5. Kebijakan yang otoriter sehingga mengatur segala aspek di masyarakat.
6. Kebijakan hanya melibatkan orang-orang tertentu yang dianggap ahli.
7. Kebijakan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mau pun pelaksanaan kebijakan.

Pembangunan adalah suatu tahap atau taraf dalam pertumbuhan, kemajuan dan perkembangan dari sebab akibat yang terencana. Apa yang diartikan Wickenden dalam bukunya lebih cenderung kepada suatu perubahan yang terencana. Konsep pembangunan sosial atau *social development* adalah sebagai aspek semua yang terkait dengan relasi-relasi sosial, sistem sosial, kebijakan sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal tersebut (Elizabeth WickendeN, 1965:4)

2.1.3 Teori dan Proses kebijakan Publik

public policy dapat dilihat sebagai filosofi, sebagai produk, sebagai proses, dan juga sebagai kerangka kerja (Keban 2004:55). Kemudian dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai filosofi merupakan serangkaian prinsip atau keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai produk kebijakan dipandang sebagai kesimpulan dan rekomendasi.
3. Sebagai proses kebijakan dilihat sebagai rangkaian cara yang dilalui organisasi untuk dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program.
4. Sebagai kerangka kerja kebijakan merupakan suatu proses negosiasi dalam merumuskan ide-ide dan implementasinya.

Dunn (2003) berpendapat bahwa proses analisis kebijakan public adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dapat disebut dengan proses pembuatan kebijakan, yang didalamnya terdapat hubungan tahapan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan disusun berdasarkan urutan waktu yang meliputi tahap pembuatan agenda, formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kemudian, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, forecasting, saran kebijakan, pengawasan dan penilaian kebijakan.

2.1.4 Evaluasi Kebijakan

Pendapat Lester dan Stewart dalam Leo Agustino (2008:185) Tujuan evaluasi adalah untuk melihat sebagian kegagalan dan untuk melihat apakah kebijakan yang telah dirancang dan di implementasikan dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diinginkan.

Sedangkan Anderson (dalam Arikunto Suharsimi dan Cipi Safrudin, 2004) mengemukakan Evaluasi sebagai proses yang menentukan dari hasil yang akan dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Stufflebeam (Arikunto Suharsimi dan Cipi Safrudin, 2004) mengatakan evaluasi adalah proses pendeskripsian, pencarian dan pemberian informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif-alternatif pilihan dalam mengambil keputusan.

Menurut Wirawan (2012;7) evaluasi adalah sebagai penelitian guna mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi yang berguna bagi objek evaluasi, menilai dan juga membandingkan indicator dengan hasil yang

digunakan untuk mengambil keputusan.

Selanjutnya menurut Dunn (Subarsono 2011:124) merincikan ada tiga jenis pendekatan dalam evaluasi, yaitu evaluasi semu; yang artinya pendekatan evaluasi menggunakan metode deskripti atau penggambaran untuk menghasilkan informasi yang akurat mengenai kebijakan, tanpa mencari pendapat dari hasil kebijakan tersebut kepada individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; artinya pendekatan evaluasi menggunakan metode penggambaran untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi proses keputusan teoritis; artinya pendekatan yang digunakan adalah metode penggambaran untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai hasil kebijakan secara eksplisit yang diinginkan pemangku kebijakan.

Kemudian sebagai perbandingan menurut James P. Lester dan Joseph Steward Jr (Nugroho, 2009:674) mengelompokkan evaluasi pelaksanaan kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan; evaluasi impact yaitu evaluasi yang berhubungan dengan hasil atau pengaruh dari pelaksanaan kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai melambangkan suatu tujuan yang diinginkan; dan evaluasi metaevaluasi yang berhubungan dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ada untuk menemukan apa saja kesamaan-kesamaan dalam kebijakan.

Selanjutnya James Anderson (Winarno, 2012:168) mengelompokkan

evaluasi kebijakan public menjadi tiga, pertama evaluasi kebijakan public dipahami sebagai kegiatan fungsional, kedua evaluasi memfokuskan pada bekerjanya suatu kebijakan, dan yang ketiga evaluasi kebijakan terstruktur dimana evaluasi melihat secara objektif program kegiatan yang yang dirancang untuk mengukur bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya.

Adapun indicator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan menurut Dunn (Nugroho, 2009:671) yaitu sebagai berikut :

- a. Efektifitas, pada kriteria ini memfokuskan pada pencapaian hasil. Efektifitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk dan layanan maupun nilai moneternya.
- b. Efisiensi, berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Pemerataan, berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha apa yang dilakukan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Responsivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat
- f. Ketepatan berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua

atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketetapan lebih mengutamakan analisis mengenai manfaat dari kebijakan terhadap sasaran.

Dari penjelasan beberapa deinisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk melihat pelaksanaan dan kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan yang sudah terlaksana dengan baik atau belum, dan tujuan dari evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dijalankan layak untuk dilanjutkan atau tidak.

2.1.5 Lingkungan Evaluasi Kebijakan

Seorang evaluator harus mempertimbangkan keterkaitan orang yang bersangkutan dengan program yang akan dievaluasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Wahab (2016: 45) lingkungan evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

- a. Lingkungan Internal Lingkungan internal merupakan individu yang menjadi bagian dari struktur formal yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Maksud struktur formal adalah stakeholders atau aktor pelaksana kebijakan dan implementasi program yang akan dievaluasi. Kelebihan melakukan evaluasi dalam lingkungan internal adalah responden/ informan lebih memahami program yang akan dievaluasi, namun kekurangannya adalah responden/informan dikhawatirkan akan bertindak subyektif.
- b. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat dan melaksanakan

kebijakan, namun terkena impact serta dampak pelaksanaan kebijakan. Mereka diminta untuk mengevaluasi keberhasilan program atau keterlaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan. Kelebihan melakukan evaluasi dalam lingkungan eksternal adalah responden/informan akan bertindak objektif selama melakukan evaluasi sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan, namun kekurangannya responden/informan tersebut kurang memahami kebijakan atau program yang akan dievaluasi..

2.1.6 Konsep Evaluasi Program

Karding (2008) memberikan pendapat bahwa program adalah sub atau unit kesatuan dalam kegiatan dimana pelaksanaan kebijakan berlangsung dalam suatu proses yang berkesinambungan yang terjadi dalam organisasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Dengan demikian dapat dilihat bahwa program terdapat tiga unsur penting yaitu:

- a) Program merupakan implementasi suatu kegiatan
- b) Pelaksanaannya terjadi dalam waktu yang relative lama dan berkelanjutan.
- c) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak.

Menurut Ralp Tyler (Farida 2008:7) evaluasi program adalah suatu proses untuk melihat apakah tujuan dari program sudah terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat artikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang cara kerja program pemerintah, yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk

menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan

2.2 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengetasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan taraf permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan daya serap pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya tujuan RPJMN 2015-2019. (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016)

Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh di perkotaan guna mendukung terciptanya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi "platform" atau basis penanganannya kumuh yang mengintegrasikan sebagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pihak donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

KOTAKU bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang terpadu guna dalam penanganan kekumuhan, dimana setiap pemerintah daerah memimpin dan berkerjasama dengan para *stakeholder* dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaannya, serta mengutamakan keikutsertaan masyarakat. KOTAKU

diharapkan menjadi rencana kerjasama yang mendukung wilayah pemukiman kumuh yang dilakukan secara bejenzang di seluruh wilayah Indonesia melalui pengembangan daya serap pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastuktur dan pelayanan dasar ditingkat kota.

Dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh yang akan dilakukan adakah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dalam pembangunan tersebut program ini seharusnya bermanfaat dalam penanggulangan lingkungan kumuh perkotaan yang ada di wilayah indonesia.

Tujuan dari program kota tanpa kumuh adalah memperbaiki akses terhadap sarana prasarana dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan guna mendukung terciptanya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Memperkecil atau menuntaskan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan.
2. Membentuk kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten/Kota guna penanganan masalah kumuh dengan baik.
3. Tertatanya rencana penanganan kawasan kumuh yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembangunan inrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendorong pencegahan dan juga untuk peningkatan kualitas permukiman perkotaan kumuh; dan

5. Terimplementasi aturan bersama sebagai upaya dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kekumuhan.

Agar mencapai tujuan dari program yang dirancang dapat diukur melalui indikator kinerja keberhasilan dan sasara pencapaian program yang bekerjasama terhadap pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu penuntasa permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut;

1. Memperbaiki atau meningkatkan fasilitas masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Mengurangi kawasan kumuh agar fasilitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan menjadi lebih baik.
3. tercipta dan berjalannya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendorong program KOTAKU; dan
4. Penerima manfaat merasa puas dengan tingkat infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

Adapun strategi operasional yang ditekankan pada program kota tanpa kumuh yaitu:

1. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai

berikut;

- a. Melaksanakan program penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan tingkat pemukiman kumuh.
- b. Meningkatkan daya serap dan memperbanyak kelembagaan yang bisa bekerjasama dan menciptakan struktur penuntasan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat;
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektordan multi-aktor;
- d. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- e. Mengakomodasi kerjasama dalam pemanfaatan produk data dan agenda yang telah ditentukan, Termasuk dalam pengesahan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- f. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- g. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelakukunci; dan
- h. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

2. Prinsip

Prinsip dasar yang dilakukan dalam implementasi Program Kotaku adalah:

a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda.

Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sector maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program).

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Agenda penanganan kumuh merupakan hasil Pemda sehingga berpedoman pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan pengabungan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota/ kabupaten dimana dalam tahap pelaksanaan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan pengabungan penganggaran mulai dari Pemerintah

Provinsi, Pemkot/ Pemkab sampai pemerintah desa dan kecamatan.

2.2.1 Penyelenggaraan Program Kotaku Tingkat Desa/Kelurahan

Program kotaku tingkat kelurahan/desa atau kecamatan memiliki tahapan yang sinergis dengan program perencanaan bangunan kemudian menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dengan program tingkat kabupaten/kota yang dihubungkan dengan forum-forum konsultasi intensif.

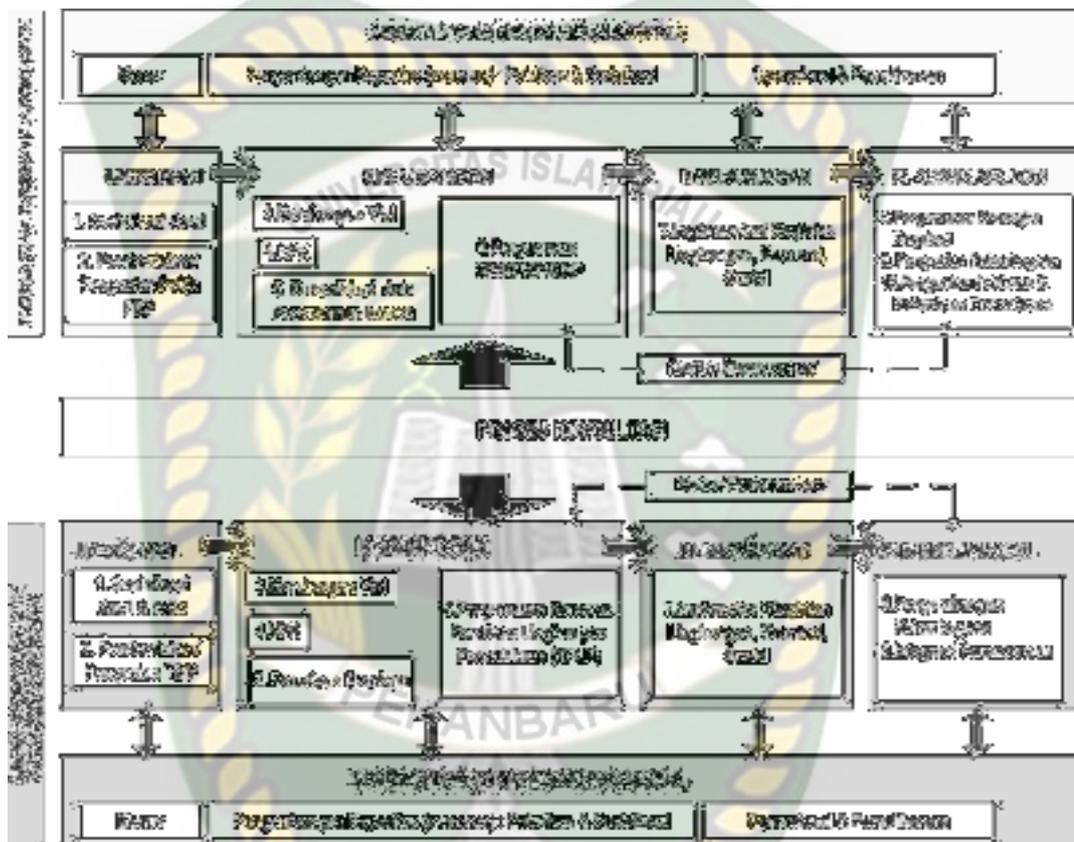
Untuk mewujudkan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut ini adalah tahapan ditingkat kelurahan/desa yang telah bersinergi dengan tahapan tingkat kabupaten/kota yaitu:

1. Tahap persiapan
2. Tahap perencanaan
3. Tahap pelaksanaan
4. Tahap keberlanjutan.

Tahapan tersebut akan berulang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tahap kegiatan perencanaan pembangunan regular. Adapun tahap kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.1

**Tahap Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Tingkat Kabupaten/Kota
Dan Tingkat Kelurahan/Desa**



1. Tahap persiapan

Tahap persiapan melibatkan peran kontribusi pemerintah dengan kecamatan, kelurahan/desa, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam berkolaborasi. Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama yaitu: (1) sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat desa/kelurahan; (2) pembentukan/penguatan tim perencanaan partisipatif penataan lingkungan (TIPP).

2. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi umum pemukiman layak huni ditingkat kelurahan/desa yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang. Sesuai dengan visi dan misi pemukiman tingkat kelurahan /desa untuk mencapai 0 Ha pemukiman kumuh yang dituangkan dalam rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP).

Adapun yang menjadi tahap perencanaan yaitu:

- a. Membangun visi
- b. Refleksi Perkara Kritis (RPK)
- c. Pemetaan Swadaya
- d. Tahap Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)
- e. Penyusunan Rencana Teknis
- f. Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi

3. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi maupun infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RPLP. Dalam pelaksanaan harus dilakukan secara transparan, dan akuntabel dimana setiap transaksi harus bias dipertanggungjawabkan dan dicatat dalam pembukuan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah berkas RPLP disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di RPLP serta merupakan kegiatan prioritas penanganan pemukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan pembangunan berasal dari beberapa sumber yaitu:

- a. APBN/bantuan dana investasi (BDI)
- b. APBD
- c. APB desa
- d. Swasta
- e. Swadaya
- f. DII

4. Tahap Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan ini dimaksud sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan yang dilakukan. Meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus diupayakan sejak awal proses tahapan persiapan, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diuraikan sebagai berikut.

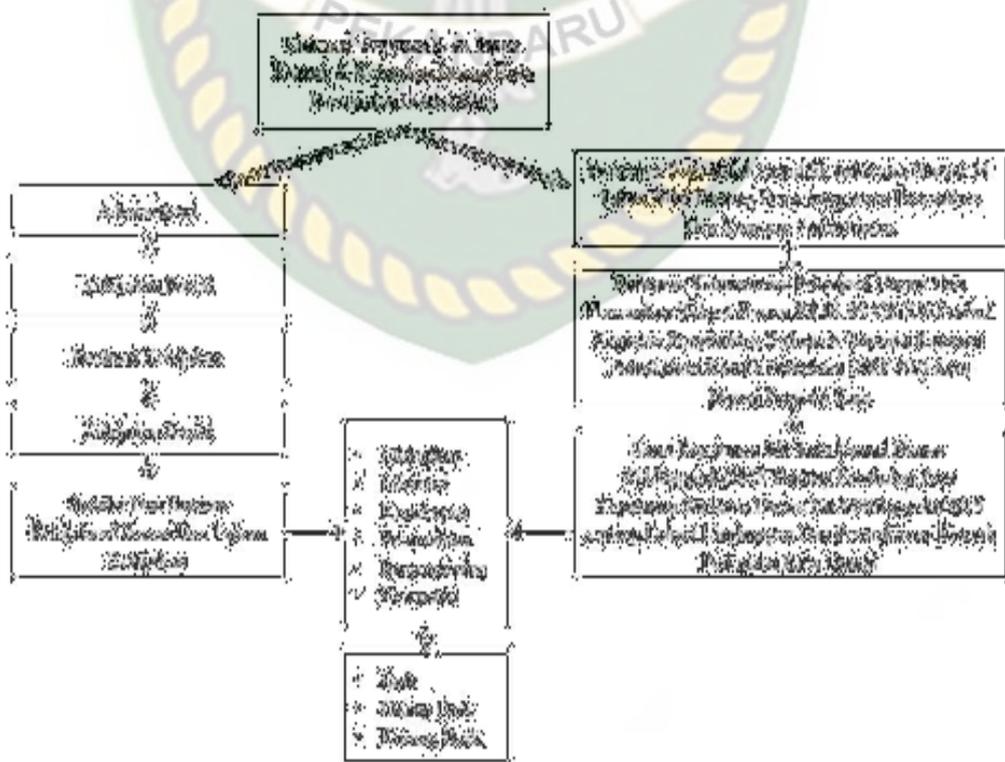
- a. Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara terus menerus
- b. Kegiatan menerus dan berkala
- c. Integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah
- d. Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
- e. Pengembangan kapasitas
- f. Operasi dan pemeliharaan serta pengembangan dan inovasi kegiatan

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan penelitian yang merupakan peristiwa atau gejala yang diteliti. Dalam hal ini adalah Evaluasi Program Kota Tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai.

Berdasarkan teori-teori yang membahas masalah ini, maka pada penelitian ini penulis menetapkan kerangka berfikir adalah Evaluasi Program Kota tanpa Kumuh di Kelurahan dumai Kota Kecamatan dumai Kota-Kota dumai diteliti melalui Dunn (Nugroho 2009:671). Ada pun kerangka berfikirnya sebagai berikut;

Gambar II.2
Kerangka Berpikir tentang Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai



2.4 Hasil penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul/Tahun | Variabel | Indikator | Hasil Penelitian |
|----|--|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tiara Dhayu Prameswari /Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan Di Kota Bandar Lampung | Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas • Efisiensi • Kecukupan • Kesamaan | Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program belum tercapai sebagaimana mestinya. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Miftahudin /Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus Smp Negeri 10 Kota Semarang) | Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Input • Proses • Output • Outcomes | Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan kebijakan kurang efektif karena terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pembuatan kebijakan |
| 3 | Muhammad Firyal Akbar/ Evaluasi Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah | Evaluasi kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas • Kecukupan • Perataan • Responsivitas • Ketepatan | Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik, walaupun demikian masih ada poin-poin yang menjadi kelemahan dalam menunjang berjalannya program ini. |

Sumber data : modifikasi penulis 2019

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi dalam suatu kebijakan menentukan apakah kebijakan yang dilaksanakan

sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan juga apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat atau tidak. Sehingga dengan adanya evaluasi memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan dan memperhitungkan dengan tepat kebijakan yang akan dilaksanakan.

2.5 Konsep Operasional

Untuk memberikan pengertian variabel secara jelas, maka perlu dikemukakan defenisi konsep masing-masing variabel yang dipergunakan:

1. Administrasi sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mewujudkan suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelum, yang mana organisasi yang dimaksud disini adalah Kelurahan Dumai Kota
2. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Dumai Kota.
3. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis yaitu proses perencanaan kebijakan KOTAKU.
4. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa; mengawasi dan melakukan evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan akhir dari program. Maksudnya adalah proses evaluasi program Kotaku

2.6 Operasionalisasi Variabel

Selanjutnya, dapat dilihat Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan uraian konsep/variabel, indikator, sub indikator yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Untuk lebih jelas adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Operasional Variabel Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai

| Konsep | Variable | Indikator | Sub Indikator | Skala Pengukuran |
|--|--------------------|-------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Menurut Ripley dan Franklin dalam Sidik (2015 : 29), mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,kebijakan ,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran nyata (tangible output) | Evaluasi kebijakan | Efektifitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah Pelaksanaan program berjalan dengan lancer b. Apakah Manfaat program dapat dirasakan masyarakat c. Apakah Tujuan program terlaksana sesuai dengan perencanaan | Ordinal |
| | | Efisiensi | <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah Kemampuan para pelaksana program sudah baik b. Bagaimana Usaha pelaksana | |

| | | | | |
|--|--|---------------|---|--|
| | | | dalam mencapai tujuan kebijakan | |
| | | | c. Bagaimanan Pelaksana program menjalankan program dengan maksimal | |
| | | Kecukupan ; | a. Apakah Program sesuai dengan harapan masyarakat b. Apakah Program bermanfaat bagi masyarakat c. Apakah Program menyelesaikan permasalahan kekumuhan | |
| | | Perataan ; | a. Apakah program terlaksana dengan merata b. Apakah Setiap masyarakat merasakan program yang sama c. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program merata | |
| | | Responsivitas | a. Apakah Pelaksanaan program menguntungkan masyarakat | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan program berdampak baik dalam penataan kota c. Apakah Pelaksana program memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan program | |
| | | Ketepatan ; | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program bermanfaat bagi masyarakat b. Program bernilai dalam kehidupan masyarakat c. Program memiliki kualitas dalam masyarakat | |

Sumber data : Modifikasi penulis 2019

Berdasarkan table diatas maka penulis simpulkan bahwa evaluasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan tersebut.

2.7 Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator Implementasi. Teknik pengukuran tersebut antara lain:

Baik : Apabila semua indikator Evaluasi dapat

terlaksanakan dengan ukuran $> 67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua indikator Evaluasi terlaksanakan dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua indikator Evaluasi terlaksana dengan ukuran $<34\%$ dari jawaban responden.

Adapun untuk indikator untuk implementasi teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Efektifitas

Pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua sub indikator variabel Efektifitas ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran $>67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua sub Efektifitas ada dan Dipedomani dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban Responden

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator Efektifitas terlaksana dengan Ukuran $<34\%$ dari jawaban responden.

2. Efisiensi

Pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua sub indikator variabel Efisiensi ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran >67% dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator Efisiensi yang ada dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator Efisiensi terlaksana dengan Ukuran <34% dari jawaban responden.

3. Kecukupan

Pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua sub indikator variabel Kecukupan organisasi pelaksana ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran >67% dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator Kecukupan ada dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator Kecukupan terlaksana dengan Ukuran <34%dari jawaban responden.

4. Perataan

Pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua sub indikator variabel Perataan ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran $>67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator Perataan ada dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator Perataan terlaksana dengan Ukuran $<34\%$ dari jawaban responden

5. Responsivitas

Pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua sub indikator variabel Responsifitas ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran $>67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator Responsifitas ada dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub Responsivitas dengan Ukuran $<34\%$ dari jawaban responden

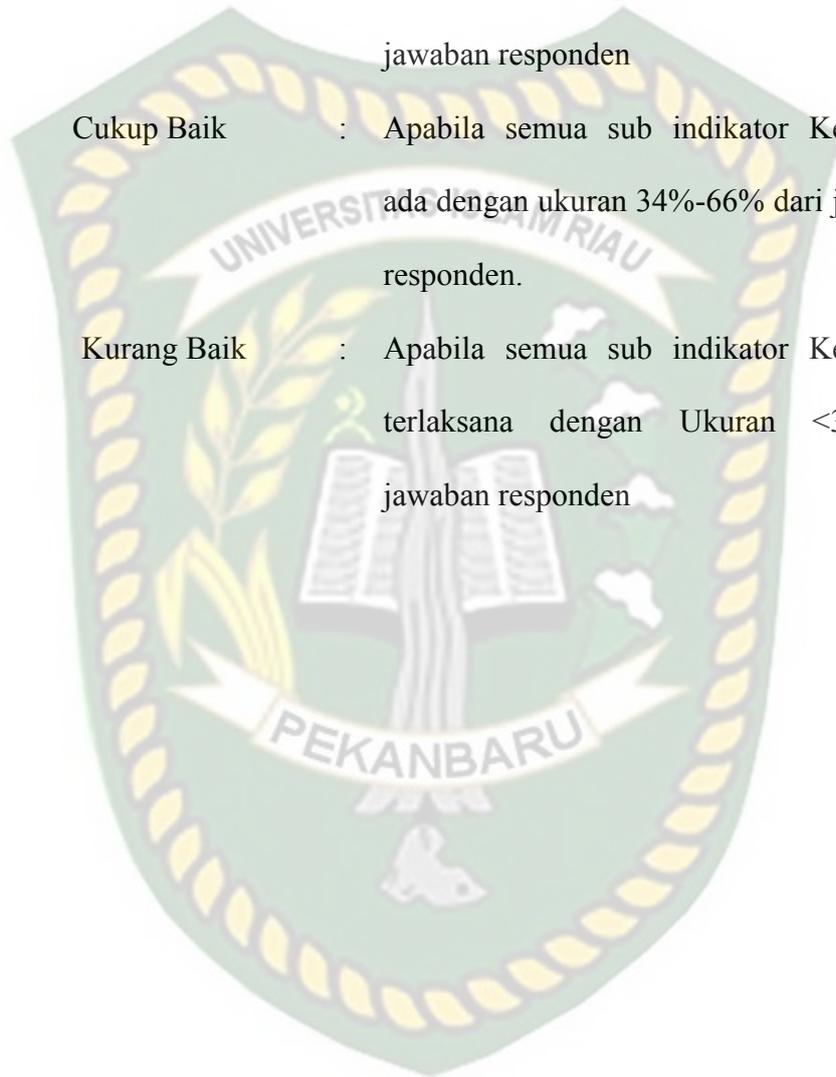
6. Ketepatan

Pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua sub indikator variabel Ketepatan ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran $>67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator Ketepatan ada dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator Ketepatan terlaksana dengan Ukuran $<34\%$ dari jawaban responden



BAB III METODE PENELITIAN

Sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam tentang Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai menggambarkan teori evaluasi dan menggambarkan realita dilapangan maka peneliti memilih menggunakan metode penelitian *mix methods* yaitu pengabungan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Cresswel:2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

3.1 Tipe Penelitian

Agar mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penelitian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah *mix methods* yaitu dimana peneliti mengabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Stategi ini melakukan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif kemudian mendapatkan data kuantitatif dengan melakukan survey (Creswell:2010:313)

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota. Mengingat Kelurahan Dumai Kota berada di tengah kota dan merupakan salah satu Kelurahan tertua di Kota Dumai yang mana beberapa

kawasan Rukun Tetangganya masih termasuk kawasan kumuh. Berdasarkan pra-survey setelah masuk dalam program Kotaku tahun 2018 kawasan kumuh di kelurahan Dumai seluas 6,32 Ha saat ini sudah berkurang dan tinggal seluas 1,46 Ha

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2013:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2013:91), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun yang dijadikan populasi dan sampel yaitu :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai

| No | Sub Populasi | Populasi | Sampel |
|--------|---|----------|--------|
| 1 | Lurah Dumai Kota | 1 | 1 |
| 2 | Sekretaris Lurah Dumai Kota | 1 | 1 |
| 3 | Ketua LPMK | 1 | 1 |
| 3 | Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Dumai Kota | 14 | 7 |
| 4 | Koordinator Kotaku Dumai Kota | 1 | 1 |
| 5 | Kepala Keluarga (RT 01, RT 02, RT 05, RT06, RT07, RT10, RT14) | 642 | 39 |
| Jumlah | | 660 | 50 |

Sumber : Olahan data tahun 2019

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah Lurah Dumai Kota, Sekretaris Lurah Dumai Kota, Ketua LPMK, Ketua RT, Koordinator Kotaku Dumai Kota dan juga masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh, untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai. Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari informan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui atau memahami program Kotaku Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota. Fokus pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).

3.5.2 Data Skunder

Data Sekunder data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dan data lainnya yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik dan lebih objektif yang akan dipublikasikan dimana dapat mendukung dan menjelaskan masalah

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota
Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya, dari data primer (data yang diperoleh langsung dari informan) dan dari data sekunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi) dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung terhadap narasumber yang mampu memberikan keterangan yang akurat kepada peneliti. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan dengan pertanyaan sama. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/terbuka yaitu susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata

dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan langsung yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengetahui gejala yang ada mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari dan memperoleh data skunder berupa data hasil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, surat-surat, literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung data sekunder sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik, dan lebih objektif yaitu sesuai dengan kondisi rill dilokasi penelitian.

4.7 Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya peneliti akan memilah-milah dan mengelompokkan menurut jenisnya, dan data yang telah dikelompokkan tersebut dimasukkan kedalam Tabel yang kemudian diolah dengan menggunakan statistika model *Rating Scale*. Menurut Riduan (2009:46) *Rating Scale* yaitu data yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Berbagai skala sikap yang sering digunakan ada 5 macam, yaitu: (1) *skala Likert*; (2) *Skala Gambar*; (3) *Skala*

Simantict Defferesial; (4) *Rating Scale* dan (5) *Scala Thurstone* dan penelitian ini menggunakan metode rating scale.

Rating Scale tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, juga bisa digunakan untuk persepsi responden terhadap gejala atau fenomena lainnya. Dalam model *rating scale* responden tidak akan menjawab dari data kualitatif pada kuisioner atau angket yang disebar, tetapi menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan.

Adapun rumus pengukuran untuk kategori skor baik, cukup baik dan tidak baik sebagai berikut :

1. Kategori Baik = $3 \text{ (jumlah nilai skor baik)} \times \text{(jumlah item yang dinilai)} \times \text{(jumlah responden)}$
2. Kategori Cukup Baik = $2 \text{ (nilai skor cukup baik)} \times \text{(jumlah item yang dinilai)} \times \text{(jumlah responden)}$
3. Kategori Kurang Baik = $1 \text{ (nilai skor kurang baik)} \times \text{(jumlah item yang dinilai)} \times \text{(jumlah responden)}$

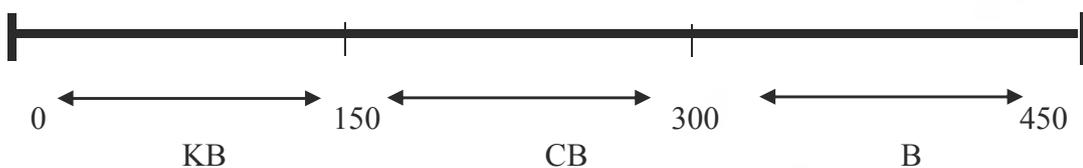
Kategori Skor Rating Scale untuk perindikator :

$$\text{Baik (B)} = 3 \times 3 \times 50 = 450 \text{ (100\%)}$$

$$\text{Cukup Baik (CB)} = 2 \times 3 \times 50 = 300 \text{ (66,67\%)}$$

$$\text{Kurang Baik (TB)} = 1 \times 3 \times 50 = 150 \text{ (33,33\%)}$$

Garis kontinium per indikator



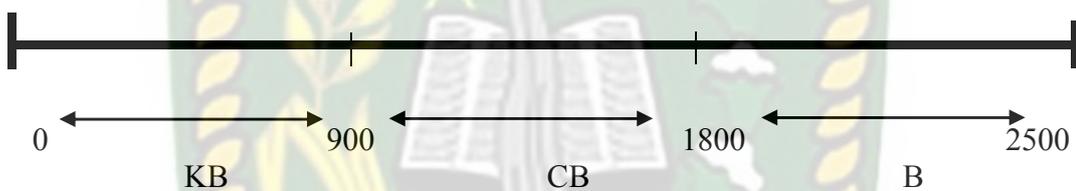


Kategori Skor Rating Scale untuk semua indikator

Baik (B) = $3 \times 18 \times 50 = 2500$ (100%)

Cukup Baik (CB) = $2 \times 18 \times 50 = 1800$ (66,67%)

Kurang Baik (TB) = $1 \times 18 \times 50 = 900$ (33,33%)



3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Bulan/ Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | September 2019 | | | | Oktober 2019 | | | | November 2019 | | | | Desember 2019 | | | | Januari 2020 | | | | Februari 2020 | | | | Maret 2020 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1. | Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB IV
GAMBARAN UMUM KELURAHAN DUMAI KOTA KECAMATAN
DUMAI KOTA KOTA DUMAI

4.1 Sejarah Kantor Lurah Dumai Kota

Kota Dumai adalah daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan UU No.16 Tahun 1999 dimana status Kota Dumai adalah kota administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa, salah satunya dari Sembilan desa tersebut adalah Desa Dumai Kota, yang saat sekarang menjadi Kelurahan Dumai Kota.

Kelurahan Dumai Kota berdiri pada tahun 1979 dan merupakan salah satu kelurahan yang ada dikecamatan Dumai Timur sebelum terjadinya Pemekaran Kecamatan Kota Dumai, kelurahan Dumai Kota merupakan kelurahan yang tertua dikota Dumai.

Sebelum menjadi Kelurahan, kelurahan Dumai Kota Masih berbentuk Desa, yakni bernama Desa Dumai Kota, yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis (sebelum 1979). Dahulu sebelum menjadi Kota Administratif Dumai, Kota Dumai merupakan wilayah pemerintahan Kota Administrasi dan pembentukannya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1979. Desa Dumai Kota terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Dumai menjadi Kota Administratif dibawah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, dan pada waktu itu Desa Dumai Kota di Kepalai oleh seorang Penghulu, pada tahun 1999 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka Desa yang ada di Wilayah Kota Madya dan Kotif berdasarkan

Undang-undang nomor 5 tahun 1974 ditetapkan sebagai Kelurahan. Perubahan ini merupakan bentuk peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada Masyarakat Perkotaan, Perubahan Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dalam KEPMENDAGRI Nomor 65 Tahun 1999. Dalam peraturan Daerah Dumai nomor 17 tahun 2008 disana mengatur tentang Pembentukan dan fungsi Organisasi Kelurahan.

Selang berjalanya waktu Seiring pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 *juncto* UU No.32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 *juncto* UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bersifat terpusat menjadi desentralisasi. Daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab secara proporsional sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Setelah terjadinya pemekaran Wilayah Kecamatan maka terjadi peningkatan status kembali semula Kelurahan Dumai Kota dibawah pemerintahan Kecamatan Dumai Timur sekarang tahun 2013 Kelurahan Dumai Kota dibawah pemerintahan Kecamatan Dumai Kota.

1. Keadaan Geografis

Secara Geografis Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km²., Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 1024'23" Bujur Timur dan 101023'37" – 101028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33C dengan kondisi tanah rawa bergambut.

Kantor Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota yang beralamatkan Jl. Datuk Laksamana dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Dumai Selatan
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Dumai Timur
- Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan Dumai Barat.

Secara umum Kelurahan Dumai Kota memilki Luas Wilayah 4,4 Km² dan terletak diatas ketinggian 1 meter diatas permukaan laut.

Melihat kondisi wilayah Jarak tempuh Kantor Kelurahan Dumai Kota dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Kota ± 500 meter, sedangkan jarak tempuh menuju pusat pemerintahan kantor Walikota Dumai ± 18 Km, dan dari pusat pemerintahan Propinsi jarak kelurahan Dumai Kota yaitu 280 Kilometer.

2. Keadaan Demografi

Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota Bersifat Heterogen yang berarti terdiri dari bermacam-macam suku seperti melayu, Minang, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, Cina dan suku-suku lainnya. dilihat dari jumlah masyarakat dilingkungan Kelurahan Dumai Kota yang terdiri dari 15 RT (Rukun Tetangga) diketahui berjumlah 5859 Jiwa.

a. Keadaan Masyarakat Kelurahan Dumai Kota menurut Jenis Kelamin

Sebagai arus pemerintahan yang berada dibawah Lurah Dumai Kota merupakan pelaksana pembantuan tugas Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dimana diketahui jumlah RT (Rukun Tetangga) sebanyak 15 RT dan jumlah Kepala Keluarga 4730 KK, untuk dapat melihat penyebaran masyarakat melalui jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel IV. 1 sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Jumlah RT dan Masyarakat Dumai Kota

| No | RT (Rukun Tetangga) | Masyarakat menurut Jenis Kelamin | | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|---------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------|
| | | Laki-Laki | Wanita | | |
| 1. | RT 01 | 399 | 367 | 766 | 13,07 |
| 2. | RT 02 | 51 | 117 | 168 | 2,87 |
| 3. | RT 03 | 252 | 226 | 478 | 8,16 |
| 4. | RT 04 | 91 | 109 | 200 | 3,41 |
| 5. | RT 05 | 153 | 149 | 302 | 5,15 |
| 6. | RT 06 | 221 | 276 | 497 | 8,48 |
| 7. | RT 07 | 284 | 282 | 566 | 9,66 |
| 8. | RT 08 | 83 | 95 | 178 | 3,03 |
| 9. | RT 09 | 157 | 162 | 319 | 5,44 |
| 10. | RT 10 | 297 | 326 | 623 | 10,63 |
| 11. | RT 11 | 193 | 196 | 389 | 6,63 |
| 12. | RT 12 | 102 | 85 | 187 | 3,19 |
| 13. | RT 13 | 187 | 179 | 366 | 6,24 |
| 14. | RT 14 | 233 | 237 | 470 | 8,02 |
| 15. | RT 15 | 180 | 170 | 350 | 5,97 |
| Jumlah | | 2883 (49,21%) | 2976 (50,79%) | 5859 | 100 |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019

Jika dilihat dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kelurahan Dumai Kota menampilkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit di dari penduduk perempuan dengan berjumlah 2883 jiwa atau sekitar 49,21% sedangkan penduduk berjenis kelamin Perempuan berjumlah 2976 Jiwa atau sekitar 50,79 %.

Berdasarkan tabel diatas Masyarakat dikelurahan Dumai Kota Tersebar melalui 15 (lima belas) Rukun Tetangga dengan jumlah kepadatan yang terbesar berada di wilayah RT 01 dengan jumlah 766 jiwa atau 13.07 %. sedangkan jumlah kepadatan penduduk terkecil berada diwilayah RT 02 dengan jumlah penduduk 168 Jiwa atau 2,87 % dari seluruh jumlah Penduduk di Kelurahan Dumai Kota.

b. Jenis Mata pencaharian penduduk

Perbedaan bentuk mata pencaharian tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang tinggal disuatu kelurahan, berikut tabel yang berisikan tentang jumlah masyarakat berdasarkan mata pencaharian dikelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota.

Tabel IV.2

Jenis Mata Pencaharian penduduk Wilayah Kelurahan Dumai Kota

| No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah Masyarakat | Persentase (%) |
|--------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Wirasawasta | 1520 | 41,67 |
| 2. | PNS (Pegawai Negeri) | 440 | 12,07 |
| 3. | Pedagang | 1200 | 32,90 |
| 4. | Pensiunan | 165 | 4,52 |
| 5. | Buruh | 322 | 8,82 |
| Jumlah | | 3647 | 100 |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan jenis mata pencaharian yang berada dilingkungan kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, diketahui mata

pencapaian wirasawasta ini mencakup karyawan swasta yang bekerja sebagai Kontraktor/Supplier, Karyawan Perusahaan dan lainnya dimana menunjukkan berjumlah 1520 atau persentase 41,67% dan untuk jenis mata pencapaian Wiraswasta pada Kelurahan Dumai Kota hal ini menunjukkan angka paling tinggi, kemudian PNS (Pegawai Negeri Sipil) dimana cakupan PNS ini termasuk TNI/POLRI dan Instansi Vertical dimana menunjukkan jumlah masyarakat sebanyak 440 jiwa dengan persentase 12.07 %. Untuk mata pencapaian Pedagang sesuai pada tabel diatas merupakan angka nomor 2 tertinggi setelah Wiraswasta diketahui mata pencapaian pedagang berjumlah 1200 jiwa dengan persentase 32.90%. kemudian pensiunan hal ini merupakan mata pencapaian dari berbagai jenis profesi seperti PNS, TNI/POLRI dan Instansi Vertical lainnya dan yang terakhir mata pencapaian jenis Buruh berjumlah 322 jiwa dengan persentase 8.82 %, jadi untuk keseluruhannya dari berbagai jenis mata pencapaian berjumlah 3647 atau setara dengan 100 %

4.2 Keadaan dan Komposisi Pegawai Kantor Lurah Dumai Kota

1. Keadaan dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Lurah Dumai Kota maka dipersiapkan personil yang dapat menunjang kegiatan dan program kerja yang harus diselesaikan.

Dalam operasional kantor Lurah Dumai Kota memiliki 10 pegawai/tenaga yang terdiri dari 4 perempuan dan 6 laki-laki. Pekerjaan dilakukan menurut bidang dan kerjanya masing-masing. Dapat dilihat dari tabel IV.3 berikut ini :

Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Klasifikasi Pegawai | | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|---------------|---------------------|---------|--------|----------------|
| | | PNS | Honorer | | |
| 1. | Pria | 3 | 1 | 4 | 60 |
| 2. | Wanita | 2 | - | 2 | 40 |
| Jumlah | | 5 | 1 | 6 | 100 |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, diketahui jumlah pegawai Pria dengan klasifikasi 3 orang PNS dan 3 Tenaga Honorer dimana jumlah keseluruhannya 6 orang atau 60 %, kemudian untuk jumlah pegawai Wanita berjumlah 4 orang dengan persentase 40 %, dan jumlah pegawai keseluruhannya 10 orang pegawai atau persentase 100%

2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsionalnya

Mengingat Kantor Lurah Dumai Kota merupakan salah satu tugas Pemerintahan dalam memberikan pelayanan maka Pegawai Kantor Lurah Dumai Kota harus memiliki Kompetensi sebagai sumber daya Organisasi Pemerintahan bidang pelayanan masyarakat berikut disajikan data tabel Komposisi Pegawai berdasarkan jabatannya.

Tabel IV.4.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsionalnya

| No. | Nama Jabatan | Jumlah Orang | Persentase (%) |
|--------|---|--------------|----------------|
| 1. | Lurah | 1 | 100 |
| 2. | Sekretaris Lurah | 1 | 100 |
| 3. | Kasi Pemerintahan | 1 | 100 |
| 4. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | 1 | 100 |
| 5. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | 1 | 100 |
| 6. | Pegawai Honorer | 1 | 100 |
| Jumlah | | 6 | 100 |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019.

Data tabel IV.4 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jabatan Fungsional yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, hal ini disesuaikan dengan peraturan Walikota Dumai Nomor 43 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan sekota Dumai.

3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan dalam Suatu Organisasi sangat diperlukan mengingat Kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing sumberdaya manusia dalam organisasi demi tercapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui jumlah pegawai menurut Pendidikan pada Kantor Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai.

Tabel.IV.5.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

| No. | Pendidikan | Klasifikasi Pegawai | | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|----------------|---------------------|---------|--------|----------------|
| | | PNS | Honoror | | |
| 1. | SLTA/Sederajat | - | 1 | 1 | 20 |
| 2. | D3 /Sederajat | 1 | - | 1 | 20 |
| 3. | S.1 | 4 | - | 4 | 60 |
| Jumlah | | 5 | 1 | 6 | 100 |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019.

Data tabel diatas menunjukkan Keadaan dan Komposisi pegawai berdasarkan latar belakang Pendidikan hal ini merujuk pada kompetensi pegawai dalam melakukan kegiatan pelayanan dimana Jumlah jenjang pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 1 orang dengan kualifikasi tenaga Honoror 1 orang atau persentase 20 %, kemudian untuk jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang dengan presentase 20%, selanjutnya untuk Strata pendidikan S1. Sebanyak 4

orang dengan persentase 60 %, maka diketahui jumlah keseluruhannya pegawai Kelurahan Dumai Kota sebanyak 6 orang.

4. Keadaan dan Komposisi Pegawai berdasarkan Masa Kerja

Selain masa kerja merupakan hal yang penting sebab dapat memperlihatkan kondisi sebenarnya dimana dapat dilihat kemahiran menyelesaikan dan menangani persoalan yang dihadapi di masyarakat saat ini.

Pengalaman kerja merupakan syarat penting bagi seorang Pegawai yang dapat dilihat dari masa kerja Pegawai tersebut, pengalaman yang didapat selama bertugas dalam satu posisi sangat menentukan bahwa kemungkinan besar ilmu yang didapat pegawai tersebut besar kemungkinan dalam menyelesaikan masalah.

Untuk dapat melihat masa kerja Pegawai Kenator Lurah Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6.

Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

| No. | Masa Kerja | Klasifikasi Pegawai | | Jumlah | Persentase % |
|--------|---------------|---------------------|---------|--------|--------------|
| | | PNS | Honorer | | |
| 1. | 1 – 5 Tahun | 1 | - | 1 | 20 |
| 2. | 6 – 10 Tahun | 4 | - | 4 | 60 |
| 3. | 11 – 15 Tahun | - | 1 | 1 | 20 |
| 4. | 16 – 20 Tahun | - | - | - | - |
| 5. | 20 – 25 Tahun | - | - | - | - |
| Jumlah | | 5 | 1 | 6 | 100 |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019.

Data tabel diatas merupakan keadaan pegawai sesuai dengan masa kerja, dimana masa kerja merupakan pengalaman bagi individu setiap pegawai diketahui masa kerja 1 - 5 tahun sebanyak 1 orang, atau persentase 20 %, untuk masa kerja 6-10 sebanyak 4 orang dengan persentase 60%, diketahui masa kerja

11 – 15 tahun sebanyak 1 orang maka diketahui jumlah pegawai Kantor Lurah Dumai Kota sebanyak 6 Orang.

4.3 Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Kantor Lurah Dumai Kota.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan kerja sama. Struktur organisasi merupakan kerangka dalam mana organisasi beroperasi (Terry.2010:120), Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Kantor Lurah Dumai Kota sebagai berikut :

Gambar IV. I
Struktur Organisasi Pegawai Kantor Lurah Dumai Kota
Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai



Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Kantor Kelurahan Dumai Kota dalam pembentukannya dengan peraturan tersebut diatas, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan. Adapun uraian-uraian tentang masing tugas diatas adalah sebagai berikut :

a. Lurah

Pasal 17 menerangkan Tugas Lurah adalah :

Memimpin,melaksanakan,mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kelurahan sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahn Kelurahan, pemberdayaan,dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahn lainnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku .untuk melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan
3. Pelaksanaan pembinaan kehidupan kemasyarakatan
4. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
5. Pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sekretaris Kelurahan

Pasal 18 Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan Administrasi. Dan memberikan pelayanan teknis Administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan, adapun uraian tugas sekretaris Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintahan Kelurahan.
2. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kerumahtanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintahan Kelurahan.
3. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan.
4. Melaksanakan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat.
5. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan .

9. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Pasal 19 Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri, adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat.
2. Melakukan pengelolaan dan pelayanan Administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Melakukan pelayanan administrasi pertanahan.
4. Melaksanakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan penyelenggaraan Administasi pemerintahan Kelurahan
5. Mengkoordinasi pelaksanaan penyelengraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perangkat Daerah dan instansi lainnya dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemilihan umum.
6. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan.
7. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaporan kegiatan harian lurah.

8. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Melakukan inventarisasi permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
10. Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan.
11. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
12. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi kepengurusan RT.
13. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan ketua RT.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
16. Melaksanakan koordinasi pelayanan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan.
17. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20 Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi sarana dan prasarana ,melakukan perencanaan pembangunan

fisik, pelayanan umum ,perekonomian dan lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan Kelurahan, adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum;
2. Melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pembangunan pemerintahan Kelurahan ;
4. Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kelurahan;
5. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan;
6. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
7. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup.
8. Melakukan penyusunan program dalam rangka menyelenggarakan lomba di Kelurahan.
9. Menyusun bahan rumusan pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.
10. Melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan perangkat Daerah dan instansi lainnya.

11. Melaksanakan pelaksanaan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat.
12. Melaksanakan pelaksanaanpembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan potensi pendapatan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
13. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan.
14. Menyusun bahan rumusan pengembangan potensi pendapatan Daerah dan peningkatan perekonomian di wilayah Kelurahan.
15. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi pengembangan potensi pendapatan Daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan perangkat Daerah dan instansi lainnya.
16. Melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
17. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 21 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program,pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya,bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan pemberdayaan perempuan. Adapun uraian tugas pada seksi kesejahteraan social adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial .

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan pendidikan umum dan agama .
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan olahraga dan kesenian.
5. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka membina dan mengembangkan kegiatan kepemudaan, Pramuka dan pemberdayaan perempuan.
6. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka membina lembaga keagamaan dan sosial.
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan .
8. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
9. Melakukan penyiapan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Seksi Ketentraman dan ketertiban

Pasal 22 Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan ,perencanaan,

pelaksanaan pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan, Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dalam rangka keamanan dan ketertiban .
2. Melaksanakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum pemerintahan Kelurahan.
3. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pelaksanaan dan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengwujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan, berperan serta dalam pengamanan pelaksanaan peraturan Daerah, perizinan dan retribusi Daerah.
5. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum.
6. Melakukan koordinasi dan ikut berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan peraturan Daerah, perizinan dan retribusi Daerah.
7. Melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran.
8. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perangkat Daerah dan instansi lainnya.

9. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan.
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Pelaksanaan koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan.
14. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

4.4 Sarana dan prasarana Kantor Lurah Dumai Kota

Dalam melakukan aktifitas kerja dikantor Kelurahan Dumai Kota di butuhkan secara optimal seperti alat penunjang sarana dan prasarana komputer, meja dan kursi, lemari, printer dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV.7

Sarana dan Prasarana

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|-----|---------------|--------|---------|
| 1. | Gedung Kantor | 1 | Baik |
| 2. | Meja 1 Biro | 2 | Baik |
| 3. | Meja ½ Biro | 5 | Baik |
| 4. | Kursi Kerja | 5 | Baik |

| | | | |
|-----|-------------------|---|------|
| 5. | Kursi palstik | 7 | Baik |
| 6. | Lemari Arsip | 1 | Baik |
| 7. | Komputer | 1 | Baik |
| 8. | Printer | 1 | Baik |
| 9. | Filling Cabinet | 2 | Baik |
| 10. | Mesin Tik Manual | 1 | Baik |
| 11. | Rak Tingkat Arsip | 4 | Baik |
| 12. | Aula Kantor | 1 | Baik |

Sumber: Kantor Lurah Dumai Kota tahun 2019.

Data tabel menunjukkan Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Lurah Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, diketahui Sarana dan Prasarana tersebut merupakan Penunjang Kerja dan kegiatan Pegawai dalam menjalankan Fungsi dan Tugasnya.

Sarana dan Prasarana tersebut yang asal usulnya diperoleh melalui APBD Kota Dumai dan disediakan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dalam peraturan ini jelas disebutkan bahwa Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang bertujuan agar terbangunnya sistem yang terpadu dalam penanganan pemukiman kumuh perkotaan, dimana pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat menjalankan program kota tanpa kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan masyarakat.

5.1 Identitas Responden

Pada penyebaran kuisioner penulis membagikan subjek penelitian penulis yang akan mempermudah penulis yaitu menurut jenis kelamin, tingkat umur dan pendidikan sehingga mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian penulis.

Untuk melihat data responden penulis dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Berdasarkan tingkat umur

Dari hasil yang penulis temukan dilapangan tentang responden yang dimaksud dapat penulis gambarkan, bahwa masing-masing responden adalah

mereka yang berusia rata-rata antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Untuk lebih jelasnya dengan usia responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1
Responden Berdasarkan Tingkat Umur

| No | Tingkat Umur (tahun) | Pegawai dan Masyarakat | |
|--------|----------------------|------------------------|------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| 1 | 20-30 | 11 | 22% |
| 2 | 31-40 | 20 | 40% |
| 3 | 41 > | 19 | 38% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber Data : Hasil olahan penelitian lapangan tahun 2019

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa responden yang berumur antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 11 orang atau (22%), sedangkan pada tingkat umur 31-40 tahun ada 20 orang atau (40%) dan tingkat umur 41 tahun keatas ada 19 orang atau (38%).

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Perbedaan tingkat pendidikan memang merupakan salah satu panutan bagi setiap penelitian yang dilakukan, dimana dengan pendidikan akan mempermudah peneliti dalam mencari jawaban yang dibutuhkan baik melalui angket maupun wawancara. Untuk lebih jelasa perbedaan tingkat pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah

Tabel V.2
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1 | SD | 3 | 6 |
| 2 | SLTP | 13 | 20 |
| 3 | SLTA | 20 | 40 |
| 4 | Diploma I,II,II | 9 | 18 |
| 5 | S1 | 5 | 10 |
| 6 | S2 | - | - |
| Jumlah | | 50 | 100 |

Sumber Data : Hasil olahan penelitian lapangan tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTA yakni sebanyak 20 orang atau (40%), sedangkan responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 9 orang atau (18%) dan responden yang berpendidikan S1 ada 5 orang atau (10%).

5.2 Analisa Data dan Hasil Penelitian

Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang terpadu dalam penanganan pemukiman kumuh perkotaan, dimana pemerintah daerah menjalankan program kota tanpa kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan masyarakat.

Untuk menganalisa Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Dunn (Nugroho, 2009:671) menjelaskan melalui enam indikator yang dikemukakan dapat dilihat dan diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Efektifitas

Adapun yang menjadi fokus dari kriteria ini terletak pada pencapaian hasil.

Efektivitas berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan maupun nilai moneterinya adapun indikasi-indikasinya adalah:

- a. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar

Kemampuan dari pelaksana program dalam menjalankan setiap program sehingga program terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

- b. Manfaat Program dapat dirasakan masyarakat

Program yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari segi lingkungan dan juga dari segi ekonomi..

- c. Tujuan program terlaksana sesuai perencanaan

Hal ini terlihat dengan implementasi program sesuai dengan yang direncanakan dimana program mampu terlaksana dengan baik dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat

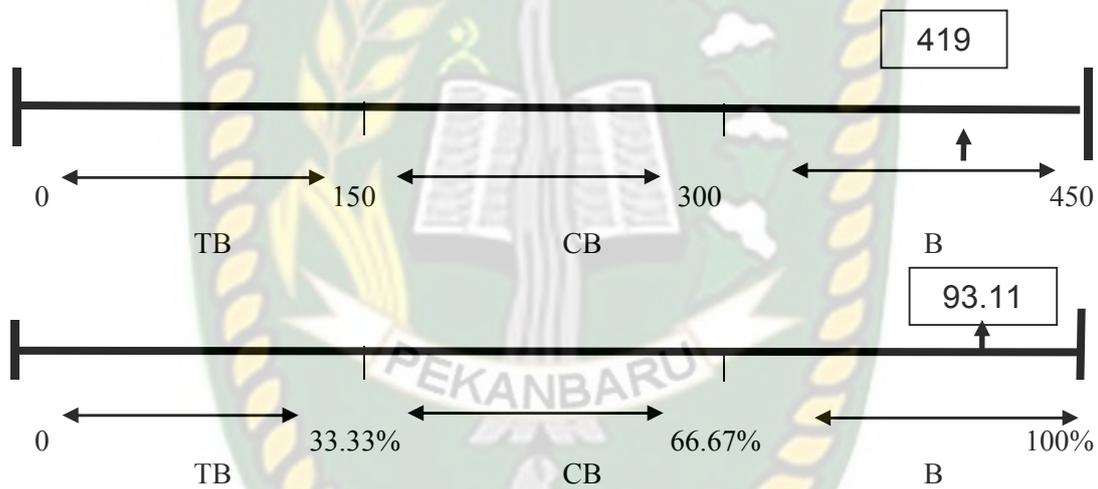
Dari ketiga item yang penulis maksudkan tersebut untuk menganalisis Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota melalui Efektivitas yang dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini

Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota

| No | Sub Indikator | Jumlah skor |
|----|---|-------------|
| 1 | Pelaksanaan program berjalan dengan lancar | 138 |
| 2 | Manfaat program dapat dirasakan masyarakat | 138 |
| 3 | Tujuan program terlaksana sesuai dengan perencanaan | 143 |
| | Total Skor | 419 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.3 di atas bahwa indikator Efektifitas tersebut diatas, berada pada kategori baik. Dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden 419 dari jumlah responden 50 dilihat melalui pelaksanaan program berjalan dengan lancar diperoleh skor jawaban sebesar 138 dan jika dilihat dari Manfaat program dapat dirasakan masyarakat diperoleh skor 138, serta jika dilihat dari Tujuan program terlaksana sesuai dengan perencanaan diperoleh skor 143. Untuk melihat kondisi yang terjadi dapat dilihat pada garis kontinium berikut



Berdasarkan kontinium diatas berdasarkan tanggapan responden atas Efektifitas dalam evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai Kota memperoleh total skor 419 berada pada kategori baik yang berada pada interval 300 - 450, dengan persentase 93.11%.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mendapati bahwa program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan kebijakan yang dibuat, dimana program tersebut berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel V.4
Realisasi Program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Dumai Kota

| Kawasan | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | Pengurangan Kumuh | | | Luas Kawasan Yang Belum Terealisasi S/D Tahun 2018 (Ha) | Persentase (%) |
|------------|-------------------------|-------------------|------|--------------|---|----------------|
| | | 2017 | 2018 | Belum Tuntas | | |
| Dumai Kota | 6,32 | - | 1,09 | - | 1,46 | |
| | | - | 0,40 | - | | |
| | | - | 0,92 | 0,62 | | |
| | | - | - | 0,74 | | |
| | | - | 1,50 | - | | |
| | | - | 0,95 | - | | |
| | | - | - | - | | |

Keputusan Walikota Dumai nomor 831 / Bappeda/2018

Berdasarkan table diatas luas kawasan kumuh kelurahan Dumai Kota seluas 6,32 Ha, kemudian setelah program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota dilaksanakan maka luas kawasan dumai kota yang belum teratasi tersisa 1,46 Ha. Yang artinya bahwa program ini berjalan dengan baik dengan mengurangi angka kekumuhan.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Lurah Dumai Kota pada tanggal 20 Februari 2020 adalah:

Lurah bersama koordinator kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai kota berupaya menjalankan program agar terlaksana dengan yang telah direncanakan.

2. Efisiensi

Maksudnya adalah berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Adapun indikasi-indikasinya adalah:

1. Kemampuan para pelaksana program

Demi berjalannya program dengan baik perlu adanya kemampuan yang baik yang dimiliki para pelaksana dalam menjalankan program. Kemampuan para pelaksana program ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada para pelaksana program.

2. Usaha pelaksana program dalam mencapai tujuan kebijakan.

Dalam mencapai tujuan kebijakan program, para pelaksana program melakukan berbagai macam usaha, mulai dari mengikuti pelatihan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga menjalankan program sesuai dengan perencanaan agar program terlaksana dengan semestinya.

3. Pelaksana program menjalankan program dengan maksimal

Dalam menjalankan program yang telah ditentukan, para pelaksana sudah berusaha menjalankan dengan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

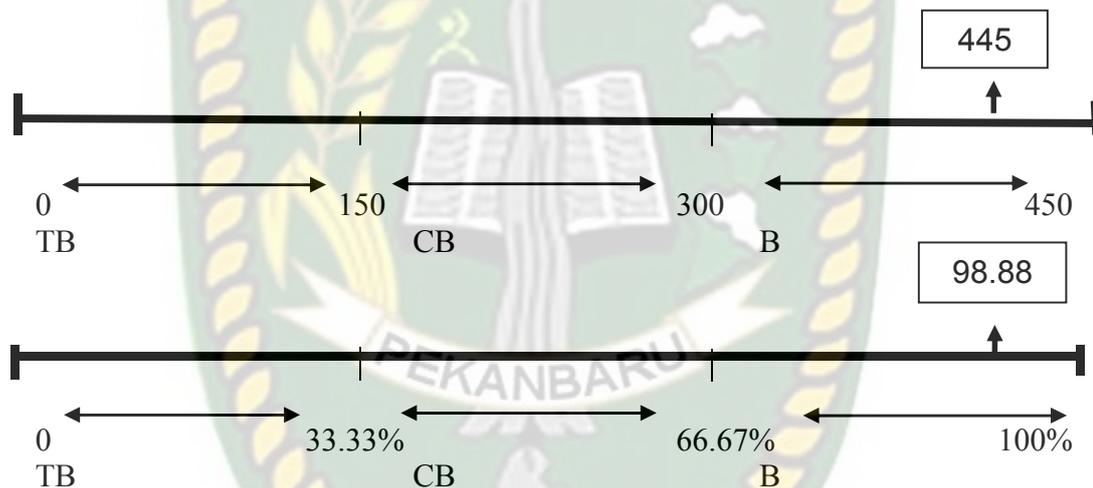
Dari ketiga item yang penulis maksudkan tersebut untuk menganalisis Evaluasi Program Kota Tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota melalui Efektifitas yang dapat dilihat pada tabel V.5 dibawah ini:

Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Efisiensi Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dumai Kota

| No | Sub Indikator | Jumlah skor |
|----|---|-------------|
| 1 | Kemampuan para pelaksana program | 145 |
| 2 | Usaha pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan | 145 |
| 3 | Pelaksana program menjalankan program dengan maksimal | 150 |
| | Total Skor | 445 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.4 di atas bahwa indikator Efisiensi berada dalam kategori baik. Dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden 445 dari jumlah responden 50 dilihat melalui adanya Kemampuan para pelaksana program diperoleh skor jawaban sebesar 145 dan jika dilihat dari Usaha pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan memperoleh skor jawaban sebesar 145, serta jika dilihat dari Pelaksana program menjalankan program dengan maksimal memperoleh skor jawaban sebesar 150. Untuk melihat kondisi yang terjadi dapat dilihat pada garis kontinuum berikut:



Berdasarkan kontinuum diatas berdasarkan temuan penelitian terhadap tanggapan responden atas Efisiensi dalam evaluasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai kota dengan total skor 445 pada kategori baik yang berada pada interval 300 - 450, dengan persentase 98.88%.

Berdasarkan observasi penulis terhadap efisiensi bahwa pelaksana program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota mampu melaksanakan program sesuai dengan yang telah di tetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel V.6

Target dan Realisasi Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2018

| Lokasi Kegiatan | Aspek | Kriteria | Target | | Realisasi | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | Volume | satuan | Volume | satuan |
| RT001-RW000 | Jalan | Jalan Beton | 91 | meter | 91 | meter |
| RT002-RW000 | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1 | unit | 66 | unit |
| RT001-RW000 | Drainase | Drainase Lingkungan | 91 | meter | 91 | meter |
| RT002-RW000 | Jalan | Jalan Beton | 98 | meter | 98 | meter |
| RT002-RW000 | Drainase | Drainase Lingkungan | 88 | meter | 88 | meter |
| RT010-RW000 | Proteksi Kebakaran | Motor pemadam kebakaran | 1 | Unit | 1 | Unit |
| RT014-RW000 | Jalan | Jalan Beton | 77 | meter | 77 | meter |
| RT014-RW000 | Drainase | Drainase Lingkungan | 56 | meter | 67 | meter |
| RT010-RW000 | Drainase | Drainase Lingkungan | 162 | meter | 162 | meter |

Data investasi 2019

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa target program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota dapat direalisasikan dengan baik, dimana semua target program yang ditentukan berhasil direalisasikan.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Lurah Dumai Kota pada tanggal 20 Februari 2020 adalah:

“Sebelum program dijalankan maka koordinator beserta anggota yang menjalankan program kotakub diberikan pelatihan dan arahan agar pelaksana mampu menjalankan program yang telah ditetapkan”.

3. Kecukupan

Adapun yang dimaksud dengan kecukupan adalah berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Adapun indikasi-indikasi kecukupan adalah:

1. Program sesuai dengan harapan masyarakat

Program yang di rencanakan sudah semestinya harus program yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana program tersebut bermanfaat dan bernilai guna bagi masyarakat yang merasakan.

2. Program bermanfaat bagi masyarakat

Agar program dinilai baik tentunya program yang direncanakan akan bermanfaat bagi masyarakat yang merasakan program baik dari segi lingkungan maupun dari segi ekonomi.

3. Program menyelesaikan permasalahan kekumuhan

Program yang dijalankan tentu harapan terbesarnya adalah mampu mengatasi masalah kekumuhan yang terjadi dan mampu membuat kondisi wilayah menjadi lebih baik lagi.

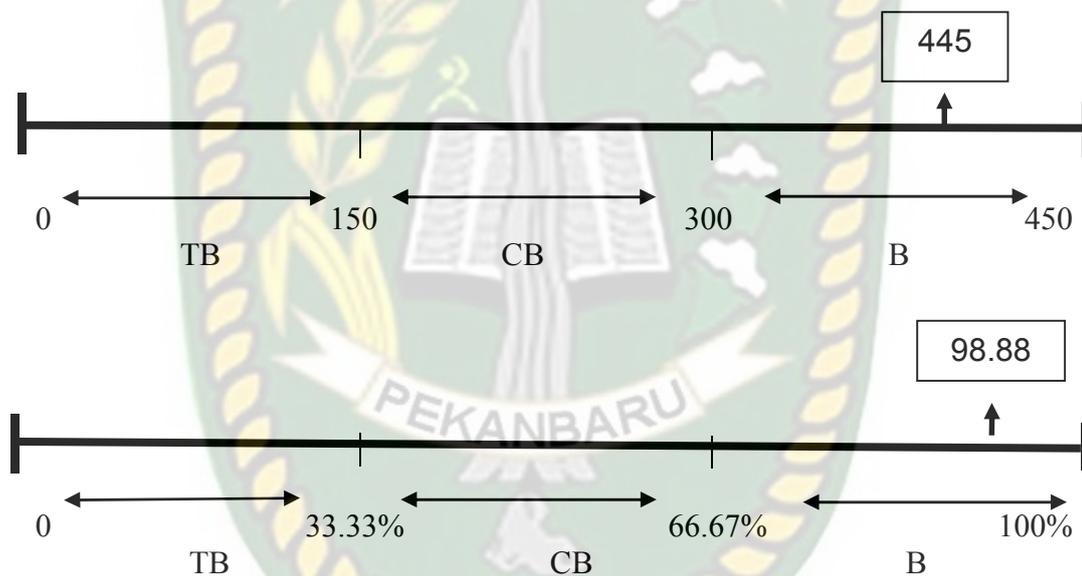
Dari ketiga item yang penulis maksudkan tersebut untuk menganalisis Evaluasi program kota tanpa kumuh pada kelurahan Dumai kota melalui Kecukupan yang dapat dilihat pada tabel V.7 dibawah ini:

Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Kecukupan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dumai Kota

| No | Sub Indikator | Jumlah skor |
|----|--|-------------|
| 1 | Program sesuai dengan harapan masyarakat | 143 |
| 2 | Program bermanfaat bagi masyarakat | 138 |
| 3 | Program menyelesaikan permasalahan kekumuhan | 133 |
| | Total Skor | 445 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.7 di atas bahwa indikator kecukupan berada pada kategori cukup baik. Dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden 445 dari jumlah responden 50 dilihat melalui Program sesuai dengan harapan masyarakat diperoleh skor jawaban sebesar 143, dan jika dilihat dari Program bermanfaat bagi masyarakat diperoleh skor jawaban sebesar 138, serta jika dilihat dari Program menyelesaikan permasalahan kekumuhan diperoleh skor jawaban sebesar 133. Untuk melihat kondisi yang terjadi dapat dilihat pada garis kontinum berikut:



Berdasarkan kontinum diatas berdasarkan tanggapan responden atas Kecukupan memperoleh total skor 445 pada kategori baik yang berada pada interval 300 - 450, dengan persentase 98.88%.

Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa program kota tanpa kumuh ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, karena masih ada beberapa aspek kekumuhan yang belum dituntaskan. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.8

Data Baseline Kekumuhan awal dan akhir kelurahan Dumai Kota

| No | Aspek | Kekumuhan Awal | Satuan | Kekumuhan Akhir | Satuan |
|----|---------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 | Kondisi bangunan gedung | 271 | Unit | 271 | Unit |
| 2 | Kondisi jalan lingkungan | 2.158.00 | m | 1.892.60 | m |
| 3 | Kondisi penyediaan air minum | 716 | Kk | 716 | m |
| 4 | Kondisi drainase lingkungan | 2.381.00 | m | 1.946.00 | m |
| 5 | Kondisi pengelolaan limbah | 245 | Kk | 220 | Kk |
| 6 | Kondisi pengelolaan persampahan | 471 | Kk | 0 | Kk |
| 7 | Kondisi proteksi kebakaran | 662 | Kk | 0 | Kk |

Data baseline kotaku kelurahan Dumai Kota Tahun 2019

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa data awal kekumuhan yang mengalami penurunan jumlah kekumuhan hanya berkurang pada aspek Kondisi jalan lingkungan yang kondisi awal kekumuhan seluas 2.158.00 meter menurun menjadi 1.892.00 meter, selanjutnya kondisi drainase lingkungan yang awal kekumuhan seluas 2.381.00 meter menurun menjadi 1.946.00 meter, kondisi pengelolaan limbah sebanyak 245 KK menurun menjadi 220 KK, kemudian kondisi pengelolaan sampah sebanyak 471 KK menjadi 0 KK dan juga kondisi proteksi kebakaran yang awal kekumuhan sebanyak 662 KK menjadi 0 KK. Maka dapat di simpulkan bahwa program penuntasan kekumuhan di Kelurahan Dumai Kota belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dimana masih ada beberapa aspek yang belum tuntas seperti kondisi bangunan gedung dan kondisi penyediaan air minum yang angka kekumuhan masih belum berkurang.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Lurah Dumai Kota pada tanggal 20 Februari 2020 adalah:

Program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat di wilayah kelurahan Dumai Kota, dimana program tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat baik dari segi penataan kota maupun dari segi ekonomi masyarakat.

4. Pemerataan

Maksudnya berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha secara merata antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Adapun indikasi-indikasi pemerataan adalah;

1. Program terlaksana dengan merata

Program yang dilakukan apakah sudah merata keseluruhan wilayah atau program dilakukan hanya di kawasan tertentu.

2. Setiap masyarakat merasakan program yang sama

Dalam pelaksanaan program tentunya masyarakat merasakan program yang sama dimana setiap wilayah mendapatkan program yang dimanfaatkan bersama-sama.

3. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program merata

Biaya yang merata disini adalah biaya dalam pelaksanaan program apakah sama di setiap daerah yang di dapat.

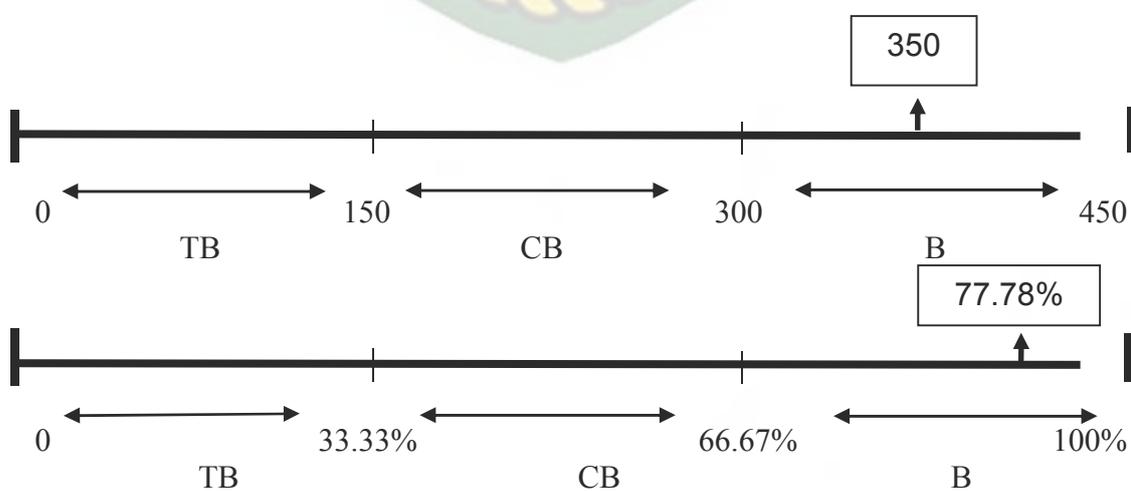
Dari ketiga item yang penulis maksudkan tersebut untuk menganalisis pemerataan program kota tanpa kumuh pada kelurahan Dumai kota melalui Kecukupan yang dapat dilihat pada tabel V.9 dibawah ini:

Tabel V.9
Tanggapan Responden Tentang Pemerataan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dumai Kota

| No | Sub Indikator | Jumlah skor |
|----|---|-------------|
| 1 | Program terlaksana dengan merata | 116 |
| 2 | Setiap masyarakat merasakan program yang sama | 113 |
| 3 | Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program merata | 121 |
| | Total Skor | 350 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.9 di atas bahwa indikator Pemerataan berada pada kategori cukup baik. Dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden 350 dari jumlah responden 50 dilihat melalui Program terlaksana dengan merata diperoleh skor jawaban sebesar 116, dan jika dilihat dari Setiap masyarakat merasakan program yang sama diperoleh skor jawaban sebesar 113, serta jika dilihat dari Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program merata diperoleh skor jawaban sebesar 121. Untuk melihat kondisi yang terjadi dapat dilihat pada garis kontinum berikut:



Berdasarkan kontinum diatas berdasarkan tanggapan responden atas pemerataan memperoleh total skor 350 pada kategori baik yang berada pada interval 300 - 450, dengan persentase 77.78%.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota belum merata, dimana masih ada beberapa wilayah yang belum merasakan program ini, karena program ini lebih memprioritaskan wilayah-wilayah dengan tingkat kekumuhan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel V.10
Kawasan Kekumuhan Kelurahan Dumai Kota

| No | Kawasan Kelurahan Dumai Kota | Kawasan Kekumuhan (Ha) |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1 | RT 001 | 1.09 |
| 2 | RT 002 | 0.40 |
| 3 | RT 003 | - |
| 4 | RT 004 | - |
| 5 | RT 005 | 0.92 |
| 6 | RT 006 | 0.72 |
| 7 | RT 007 | 0.74 |
| 8 | RT 008 | - |
| 9 | RT 009 | - |
| 10 | RT 010 | 1.50 |
| 11 | RT 011 | - |
| 12 | RT 012 | - |
| 13 | RT 013 | - |
| 14 | RT 014 | 0.95 |
| 15 | RT 015 | - |

Keputusan Walikota Dumai Nomor 831/Bappeda/2018

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Dumai Kota dari lima belas Rukun Tetangga yang mendapatkan Program Kota Tanpa Kumuh hanya tujuh rukun tetangga yang merasakan program tersebut yaitu RT 01, RT 02, RT 05, RT 06, RT 07, RT 10, dan RT 14. Hal ini berarti program kota tanpa kumuh

dinilai belum merata dikarenakan program ini lebih mengutamakan wilayah yang tingkat kekumuhannya tinggi.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Lurah Dumai Kota pada tanggal 20 Februari 2020 adalah:

Program yang dijalankan belum sepenuhnya merata dikarenakan anggaran yang terbatas sehingga program ini dijalankan berdasarkan prioritas wilayah mana yang paling membutuhkan penanganan.

5. Responsivitas

Maksudnya adalah berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat. Adapun indikasi-indikasinya adalah ;

1. Pelaksanaan program menguntungkan masyarakat

Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pprogram yang dilakukan menguntungkan bagi masyarakat yang merasakan.

2. Pelaksanaan program berdampak baik dalam penataan kota

Dalam hal ini program yang dilakukan apakah memberikan dampak yang baik dalam penataan kota sehingga membuat kota tampak lebih indah dan menyenangkan.

3. Pelaksana program memberikan informasi yang jelas tentang program

Hal ini dimaksud untuk melihat sejauh mana peranan pelaksana dalam memberikan informasi dan sosialisasi bagi masyarakat dalam pelaksanaan program.

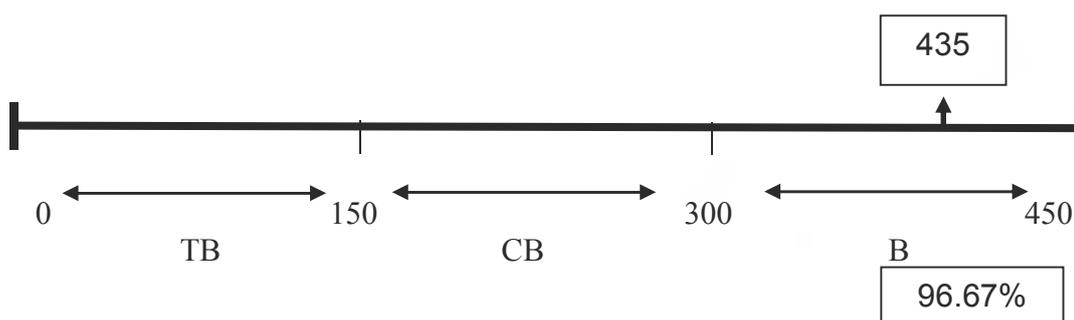
Dari ketiga item yang penulis maksudkan tersebut untuk menganalisis pemerataan program kota tanpa kumuh pada kelurahan Dumai kota melalui Responsivitas yang dapat dilihat pada tabel V.11 dibawah ini:

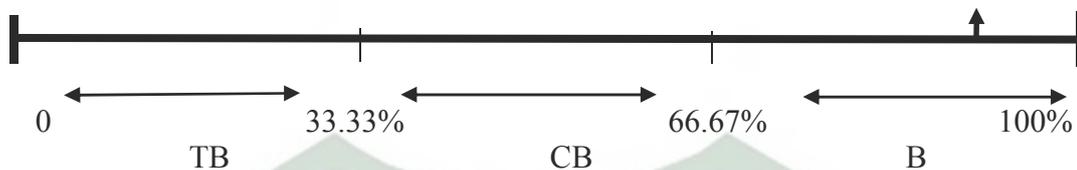
Tabel V.11
Tanggapan Responden Tentang Responsivitas Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dumai Kota

| No | Sub Indikator | Jumlah skor |
|----|---|-------------|
| 1 | Pelaksanaan program menguntungkan masyarakat | 116 |
| 2 | Pelaksanaan program berdampak baik pada penataan kota | 121 |
| 3 | Pelaksana program memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan program | 128 |
| | Total Skor | 435 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.11 di atas bahwa indikator Responsivitas berada pada kategori baik. Dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden 435 dari jumlah responden 50 dilihat melalui Pelaksanaan program menguntungkan masyarakat diperoleh skor jawaban sebesar 116, dan jika dilihat dari Pelaksanaan program berdampak baik pada penataan kota diperoleh skor jawaban sebesar 121, serta jika dilihat dari Pelaksana program memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan program diperoleh skor jawaban sebesar 128. Untuk melihat kondisi yang terjadi dapat dilihat pada garis kontinum berikut:





Berdasarkan kontinum diatas berdasarkan tanggapan responden atas Responsivitas memperoleh total skor 435 pada kategori baik yang berada pada interval 300 - 450, dengan persentase 96.67%.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa pelaksana program kota tanpa kumuh mampu membuat penataan kota jauh lebih baik dan para pelaksana program mampu memberikan informasi dan menjalankan informasi dengan baik, dimana sebelum program dijalankan para pelaksana melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat dan selalu memonitor perkembangan program.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Lurah Dumai Kota pada tanggal 20 Februari 2020 adalah:

Sebelum program dilaksanakan kelurahan beserta koordinator kotaku memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat agar terciptakan koordinasi yang baik antara pelaksana program dengan masyarakat demi mewujudkan program.

6. Ketepatan

Berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan cenderung menganalisis mengenai manfaat dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran. Adapun indikasi-indikasinya adalah ;

1. Pelaksanaan program bermanfaat bagi masyarakat

Yang dimaksud dalam hal ini seberapa banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Program bernilai dalam kehidupan masyarakat

Dalam hal ini bagaimana penilaian masyarakat akan pelaksanaan program tersebut, apakah program tersebut bernilai atau malah sebaliknya.

3. Program memiliki kualitas dalam masyarakat

Dalam hal ini dilihat bagaimana kualitas program yang dilaksanakan, seberapa besar kualitas program yang dapat dirasakan masyarakat penerima program.

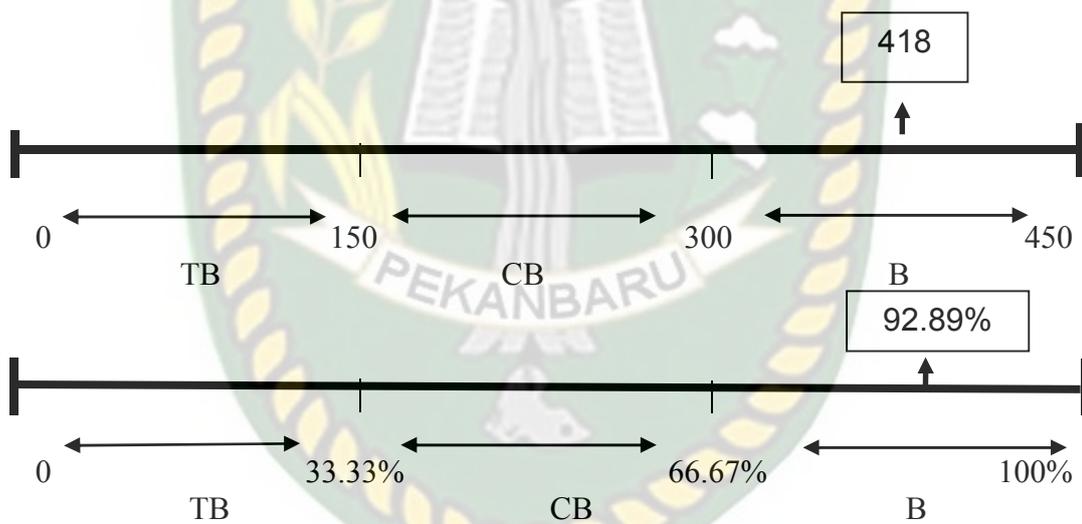
Dari ketiga item yang penulis maksudkan tersebut untuk menganalisis pemerataan program kota tanpa kumuh pada kelurahan Dumai kota melalui ketepatan yang dapat dilihat pada tabel V.8 dibawah ini:

Tabel V.12
Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dumai Kota

| No | Sub Indikator | Jumlah skor |
|----|--|-------------|
| 1 | Program sesuai dengan kebutuhan masyarakat | 133 |
| 2 | Program bernilai dalam kehidupan masyarakat | 145 |
| 3 | Program memiliki kualitas dalam kehidupan masyarakat | 140 |
| | Total Skor | 418 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.12 di atas bahwa indikator ketepatan berada pada kategori baik. Dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden 418 dari jumlah responden 50 dilihat melalui Program sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperoleh skor jawaban sebesar 133, dan jika dilihat dari Program bernilai dalam kehidupan masyarakat diperoleh skor jawaban sebesar 145, serta jika dilihat dari Program bernilai dalam kehidupan masyarakat diperoleh skor jawaban sebesar 140. Untuk melihat kondisi yang terjadi dapat dilihat pada garis kontinum berikut:



Berdasarkan kontinum diatas berdasarkan tanggapan responden atas ketepatan memperoleh total skor 418 pada kategori baik yang berada pada interval 300 - 450, dengan persentase 92.89%.

Berdasarkan observasi yang penulis ditemukan bahwa program kota tanpa kumuh di Kelurahan dumai kota sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana program ini bernilai dan memiliki kualitas dalam masyarakat karena

program ini banyak membawa perubahan di Kelurahan Dumai Kota, seperti kondisi jalan yang sudah beton dan bebas banjir, lingkungan yang bersih, drainase yang memadai.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Lurah Dumai Kota pada tanggal 20 Februari 2020 adalah:

Program ini sangat bernilai dimasyarakat dimana besar sekali manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program ini, sehingga masyarakat berharap agar program ini terus ada dan dikembangkan agar kekumuhan benar-benar teratasi di kelurahan Dumai kota.

Selanjutnya secara keseluruhan Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai kota yang diteliti melalui enam indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan delapan belas pertanyaan dapat disimpulkan bahwa evaluasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai kota berada pada kategori baik. Hal ini dilihat dari hasil jawaban responden yang penulis peroleh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel V.13
Rekapitulasi Evaluasi Program kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota dumai

| No | Indikator | Jumlah skor |
|----|---------------|-------------|
| 1 | Efektivitas | 419 |
| 2 | Efisiensi | 445 |
| 3 | Kecukupan | 414 |
| 4 | Pemerataan | 350 |
| 5 | Responsivitas | 435 |

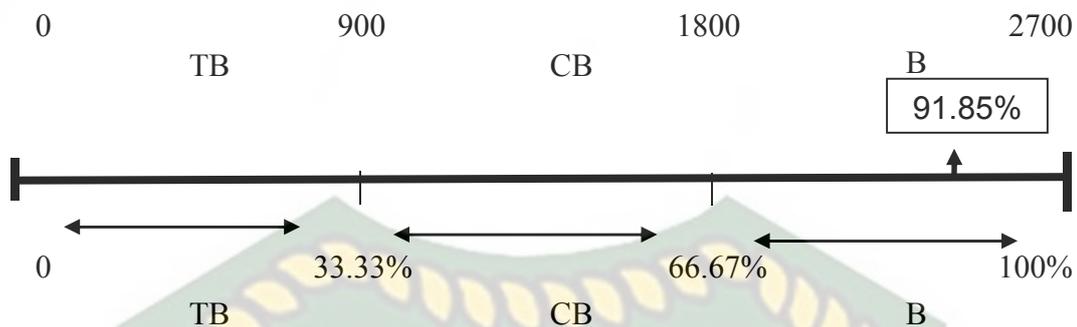
| | | |
|---|------------|------|
| 6 | Ketepatan | 417 |
| | Total Skor | 2480 |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Berdasarkan rekapitulasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota-Kota dumai yang diteliti melalui delapan belas indikator dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan skor jawaban responden yang diperoleh sebesar 2495 dari jumlah responden 50 dilihat dari rekapitulasi jawaban responden penelitian Efektivitas diperoleh skor jawaban responden sebesar 419 (93.11%) dari 50 responden berada pada kategori baik, Efisiensi diperoleh skor jawaban responden sebesar 445 (98.88%) dari 50 responden berada pada kategori baik. Kecukupan diperoleh skor jawaban responden sebesar 414 (92%) dari 50 responden berada pada kategori baik, Pemerataan diperoleh skor jawaban responden sebesar 350 (77.78%) dari 50 responden berada pada kategori baik, Responsivitas diperoleh skor jawaban responden sebesar 435 (96,67%) dari 50 responden berada pada kategori baik, sedangkan Ketepatan diperoleh skor jawaban responden sebesar 417 (92,89%) dari 50 responden berada pada kategori baik

Untuk melihat hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai Kota secara keseluruhan terdapat pada garis kontinium berikut ini:





Berdasarkan garis kontinum berdasarkan tanggapan responden atas Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai Kota memperoleh total skor 2480 berada pada kategori baik, dengan persentase 91.85%. Sehingga disimpulkan Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai Kota berada pada kategori baik.

Diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Lurah dumai kota menjelaskan

“Dari awalnya program ini berjalan hingga saat ini sudah terlihat banyak perubahan yang dihasilkan dari program ini, dimana program ini mampu menciptakan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik, baik dari segi penataan kota, perumahan yang layak huni hingga air bersih yang dahulunya menjadi masalah terbesar di kelurahan Dumai kota.

5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan Dumai Kota

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Evaluasi Program Kota Tanpa kumuh di Kelurahan dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, dimana penulis menemukan faktor pendukung dan penghambat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Dalam pelaksanaan Program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota yang menjadi faktor pendukungnya adalah peran pelaksana program kota tanpa kumuh yang mampu menginformasikan, mensosialisasikan serta mampu menjalankan program kota tanpa kumuh dengan baik sehingga program kota tanpa kumuh terlaksana dengan semestinya. Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan dumai kota kecamatan dumai kota – kota dumai dengan indikator Efisiensi dikategorikan baik, dan ini dapat dilihat dari sub indikator kemampuan para pelaksana, usaha pelaksanaan dalam mencapai tujuan kebijakan dan pelaksana program menjalankan program dengan maksimal dari 50 responden mendapatkan skor 445 atau dengan presentase 98.88% berada pada kategori baik.
- b. Faktor pendukung selanjutnya adalah program ini memberikan manfaat bagi masyarakat, dimana program ini menguntungkan masyarakat dalam penataan kota. Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan dumai kota kecamatan dumai kota – kota dumai dengan indikator Responsivitas juga berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program menguntungkan masyarakat, pelaksanaan program berdampak baik dalam penataan kota dan pelaksana program memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan program, dari 50 responden yang diteliti mendapatkan skor 435 atau dengan presentase 96.67% yang berada pada kategori baik.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota yang menjadi Faktor penghambat adalah program ini belum terlaksana dengan merata, dimana program ini lebih mengutamakan wilayah yang menjadi prioritas dalam kekumuhan. Evaluasi program kota tanpa kumuh di kelurahan dumai kota kecamatan dumai kota-kota dumai pada indikator pemerataan. Hal ini dapat dilihat dari program pelaksanaan merata, setiap masyarakat merasakan program yang sama dan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program merata mendapatkan total skor 350 atau dengan presentase 77.78% berada pada kategori baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota– Kota Dumai dapat disimpulkan:

1. Evaluasi program kota tanpa kumuh dikelurahan Dumai Kota kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai berada pada kategori baik, hal ini dibuktikan dengan dilakukan analisis terhadap enam indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan memperoleh total skor 2480 dengan presentasi 91.85% berada pada daerah baik.
2. Faktor pendukung evaluasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai dengan indikator efisisensi berada pada kategori baik, dimana dari 50 responden mendapatkan skor 445 dengan presentasi 98.88% berada pada daerah baik. Sedangkan faktor penghambat evaluasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai terdapat pada indikator pemerataan, dari 50 responden memperoleh skor 350 atau dalam presentase 77.78% berada pada kategori baik.

6.2 Saran

Saran penulis sampaikan kepada Lurah Dumai Kota beserta koordinator kota tanpa kumuh di kelurahan dumai kota adalah:

1. Sebaiknya program ini dapat dijalankan secara merata mengingat program ini berdampak positif dalam penataan kota, agar seluruh masyarakat dapat merasakan program yang sama dan kekumuhan kota dapat teratasi secara maksimal.
2. Kelurahan Dumai Kota merupakan kelurahan yang berada di pusat kota. Sebaiknya program ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan mengingat dimana bahwa pusat kota merupakan titik utama yang dilalui banyak orang dan juga Kelurahan Dumai Kota dekat dengan pelabuhan yang menjadi jalur keluar masuk turis asing sehingga jika wilayah ini masih kumuh akan mengurangi nilai wilayah terus dimata pelancong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. Evaluasi Program Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto). Gajah mada University Press.
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press:Yogyakarta.
- Edi Suharto (2011) *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Cetakan ke III, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Karding,A.K. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. Tesis. FISIP Universitas Diponegoro. Semarang
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Riduan, *Dasar-dasar Statistika Edisi Revisi*, Penerbit Alfabeta Bandung, 2009
- Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor :Erlangga
- Tayibnapi, Farida, Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta. Rineka Cipta.
- Wirawan. (2012). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Pekerja Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. 2016. *Tentang Pedoman Teknis Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*.
- Keputusan Walikota Dumai Nomor 831/Bappeda/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai No.448/Bappeda/2015 *tentang Lokasi Lingkungan Dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman